

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi ialah proses perubahan kondisi perekonomian menjadi lebih berkembang yang terjadi diukur secara kuantitatif selama rentang waktu tertentu di suatu negara atau wilayah. Terdapat hubungan timbal balik antara kemajuan ekonomi dan pembangunan manusia. Artinya keduanya harus selaras agar kualitas pembangunan dapat terwujud secara universal.¹

Seiring perubahan pola sosial dan ekonomi dalam pembangunan yang berdampak tidak merata terhadap kesejahteraan manusia. Teori *Human Development Index* (HDI), yang mengukur tingkat pembangunan manusia, pertama kali diperkenalkan pada tahun 1990, dimana indikator ekonomi yang meliputi *Gross National Product* (GNP) perkapita dengan laju pertumbuhan ekonomi, *Gross Domestic Product* (GDP) perkapita, dan indikator ke dua adalah indikator Non-ekonomi yaitu *Human Development Index* (HDI) dan *Physical Quality Life Index* (PQLI).² Adapun dalam pembangunan ekonomi syariah yaitu *Islamic-Human Development Index* (I-HDI). Selanjutnya *Islamic-Human Development Index* (I-HDI) disingkat I-HDI.

Pembangunan ekonomi dipandang juga sebagai kenaikan atau pertumbuhan pendapatan per kapita, karena hal ini menandakan adanya kemajuan dan peningkatan perekonomian rakyat.³ Namun dalam proses atau implementasinya pembangunan ekonomi dalam indikator ekonomi yaitu

¹ Kity Aiu Viollani, Siswanto Siswanto, dan Eko Suprayitno, “Pengaruh *islamic human development index* dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan dengan pengangguran sebagai variabel intervening,” *JurnalFair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan* 4, no. 11 (Juni 2022): 5233–44, <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i11.1855>.

² Michael P Todaro dan Stephen C Smith, *Economic Development*, 13 ed. (London: Pearson UK, 2020). 88-89

³ Michael P Todaro dan Stephen C Smith, *Economic Development*, 13 ed. (London: Pearson UK, 2020). 89

pendapatan perkapita atau pendapatan nasional terkadang tidak selaras dengan kondisi yang sesungguhnya.⁴

Pembangunan manusia menjadi komponen yang harus diutamakan dalam meningkatkan kualitas dan kestabilan masyarakat. Sebagai konsumen sekaligus faktor produksi peran manusia cukup dominan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi karena pembangunan manusia yang baik mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang baik pula. Pola ini terjadi ketika pembangunan manusia kualitasnya baik maka peluang terserap oleh lapangan pekerjaan semakin besar.⁵

Indikator ekonomi memiliki kelemahan, kelemahan ini timbul dengan adanya komparasi pada negara yang menggunakan indikator ekonomi sebagai suatu patokan utama dalam menentukan kesuksesan ekonomi pembangunan suatu negara. Hal ini merupakan paradigma yang berkembang sebelumnya yang menganggap bahwa pembangunan identik dengan pembangunan secara ekonomi, namun pendapat lain bermunculan dengan adanya fenomena kesenjangan sosial dan ekonomi yang tidak merata, bahwa kualitas sumber daya manusia suatu negara dapat dijadikan acuan untuk menentukan tingkat perkembangannya.⁶

Indikator Non-ekonomi ini merupakan indikator penting untuk mengukur kesejahteraan suatu negara dari aspek pembangunan secara multidimensi.⁷ Sumber daya manusia dibutuhkan dan memiliki urgensi dalam pemanfaatan sumber daya alam dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.⁸ Berdasarkan historis perkembangan ekonomi

⁴ Rafiqi Zul Hilmi, Ratih Hurriyati, dan Lisnawati, "Analisis Pengaruh Penyaluran Dana Zis, Pdrb, Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Di Indonesia TAHUN 2013-2016" 3, no. 2 (2018): 91–102.

⁵ Michael P Todaro dan Stephen C Smith, *Pembangunan Ekonomi Edisi Kesebelas Jilid 1*, terj. Agus Dharma (Jakarta: Erlangga, 2011), 386.

⁶ Michael P Todaro, *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga Edisi Keenam*. Alih Bahasa Oleh Haris Munandar (Jakarta: Erlangga, 1997), 64.

⁷ Todaro, *Pembangunan Ekonomi*, 65.

⁸ Michael P Todaro dan Stephen C Smith, *Economic Development*, 12 ed. (London: Pearson UK, 2020), 99.

pembangunan pada tahun 1990 UNDP menyajikan laporan-laporan tahunan dengan menggunakan suatu indikator yang dijadikan sebagai salah satu program pembangunan yaitu indeks pembangunan manusia (IPM) Perkembangannya terus berlanjut hingga tahun 2014, termasuk di bidang pendidikan, kesehatan, dan tingkat kehidupan yang layak.⁹

Akan tetapi ketiga komponen tersebut tidak sepenuhnya konsisten dan memadai untuk mengukur kemajuan manusia dari sudut pandang Islam. Maqāsid Syarīah bukanlah landasan bagi pendekatan teoretis dan gagasan mendasar yang digunakan untuk menyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Oleh karena itu, akan lebih tepat jika menggunakan I-HDI yang teori dan konsepnya didasarkan pada perspektif Islam yang menyeluruh untuk mengukur tingkat pembangunan manusia di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. kesejahteraan manusia diukur tidak hanya mengandalkan pada ekonomi dan sosial semata, tetapi ada pencapaian yang lebih urgensi yaitu kesejahteraan untuk mencapai *ukhrawi*.¹⁰

Teori yang digagas Muhammad Boedi Hendrie Anto merupakan orang yang pertama kali mengusulkan tentang Pada tahun 2009, ia memaparkan I-HDI dalam Konferensi Internasional Keuangan dan Ekonomi Islam Langkawi (*Langkawi Islamic Finance and Economics International Conference-LIFE 1*). Dalam studinya, Anto melaporkan hasil penilaian I-HDI untuk negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (*Organization of Islamic Cooperation*) berdasarkan lima aspek *Maqasid Syariah*.

Dari banyaknya metode yang diciptakan hanya sedikit metode yang mengukur kesejahteraan berdasarkan pandangan ekonomi Islam, hanya metode yang dikenalkan oleh Anto, Buku ini menjelaskan dasar-dasar I-HDI, sebuah indikator pertumbuhan manusia yang didasarkan pada *Maqasid Syariah*.¹¹ dan

⁹ Todaro dan Smith, *Economic Development*.⁸⁹

¹⁰ Haqiqi Rafsanjani, *Islamic Human Development Index Di Indonesia* (Surabaya: UMSurabaya, 2018).⁹⁹

¹¹ M B Hendrie Anto, "Introducing an Islamic Human Development Index (I-HDI) to Measure Development in OIC Countries," *Islamic Economic Studies* 19, no. 2 (2011): 69–95.

secara khusus menerapkannya dengan menggunakan pendekatan yang matematis.

Komponen indeks dimensi yang digunakan oleh Anto diantaranya yaitu; Selain tingkat kejahatan, korupsi, dan kekerasan, Indeks Keimanan mengukur sentimen keagamaan berdasarkan jumlah masjid, *zakat* (sedekah), partisipasi haji, dan sumbangan amal. Harapan hidup rata-rata perokok dan pengguna narkoba digunakan untuk menghitung Indeks Kehidupan, yang melambangkan pelestarian kehidupan. Tingkat pendidikan, jumlah lembaga pendidikan, rata-rata dan perkiraan tahun masa sekolah, serta jumlah hak kekayaan intelektual semuanya dimasukkan dalam *Science Index*, atau upaya untuk memelihara kecerdasan. Data keluarga, angka kelahiran, angka perceraian, dan angka kematian semuanya diperhitungkan oleh *Family-social Index*, yang mewakili pelestarian garis keturunan. Terakhir, Indeks Kekayaan menilai variabel-variabel ekonomi seperti tingkat kemiskinan, PDB per kapita, pertumbuhan ekonomi, rasio PDB terhadap pertumbuhan penduduk, dan rasio Gini.¹² Pada hakikatnya komponen yang di gagas oleh Muhammad Boedi Anto relevan dengan teori maqasid syariah Al-Syathibi karena berdasarkan komponen atau indikator penulis analisis *faith index* selaras dengan *hifdzu ad-din*, *life index* selaras dengan *hifdzu al-nafs*, *science index* selaras dengan *Hifdz al-aql*, *familiy –social index* selaras dengan *hifdzu al-nasl*, dan *property index* selaras dengan *hifdzu al-maal*.

Adapun dalam indikator pembangunan ekonomi secara konvensional atau *Human Development Index* (HDI),¹³ yang selanjutnya disingkat menjadi HDI ini dianggap tidak cukup kompatibel dan komprehensif terutama dalam pengukuran pada negara-negara mayoritas muslim di Jawa Barat. Hal ini disebabkan karena tidak terdapatnya unsur religiusitas yang dijadikan sebagai fondasi utama dalam indikator pengukurannya. Fakta ini yang menjadikan

¹² Anto, *Introducing an Islamic*.69

¹³ Mahbub Ul-Haq dan Amartya Sen, sebagaimana dikutip dalam UNDP, *Human Development Report* (Oxford: Oxford University Press, 1990).96

sebagai fundamental lahirnya model baru perspektif syariah untuk mengukur kesejahteraan manusia dalam ruang lingkup pembangunan ekonomi pada suatu negara.¹⁴

Pada tahun 2025 indeks *human development* di Jawa Barat mencapai 74,92 menempatkan HDI di Jawa Barat dalam kategori tinggi (*high human development*) memiliki HDI di bawah Jawa Barat.¹⁵ Di sisi lain, indeks tingkat kemiskinan menunjukkan adanya ketimpangan dari tahun 2020-2024 hanya mengalami perlambatan sekaligus merupakan angka keparahan kemiskinan tertinggi selama periode 2024 yang terjadi disparitas antar wilayah seperti di Indramayu mencapai 11,93 % dibandingkan wilayah urban lainnya seperti Kota Bandung dan lainnya.¹⁶ Nilai indeks tingkat keparahan kemiskinan yang lebih tinggi menunjukkan adanya kesenjangan pengeluaran yang lebih besar di kalangan masyarakat miskin.¹⁷ Fenomena ini menunjukkan bahwa skor I-HDI yang tinggi tidak selalu berkorelasi dengan skor HDI yang tinggi.

M.B. Hendie Anto memaparkan gagasan Indeks Pembangunan Manusia Islam (I-HDI) dalam studinya tahun 2009 yang berjudul “Pengantar Indeks Pembangunan Manusia Islam (I-HDI) untuk Mengukur Pembangunan di Negara-Negara OKI”.¹⁸ I-HDI (*Islamic-Human Development Index*) dihitung berdasarkan teori komprehensif yang menggambarkan lima dimensi maqasid syariah dimana merupakan buah pemikiran dari ulama cendekiawan muslim ternama yaitu Imam Al-Ghazali dan Asy-Syathibi. Kelima dimensi ini merupakan dimensi *hifdzu din*, *hifdzu nafs*, *hifdzu naql*, *hifdz nasl*, dan *hifdzu mal*.¹⁹

¹⁴ M B Hendrie Anto, “Introducing an Islamic Human Development Index (I-HDI) to Measure Development in OIC Countries,” *Jurnal Islamic Economic Studies* 19, no. 1 (2013): 69–96.

¹⁵ Saeful Millah, “Pikiran rakyat,” *pikiranrakyat.com*, 2025.

¹⁶ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, *Welfare Indicators of Jawa Barat 2016* (Bandung: BPS Provinsi Jawa Barat, 2017).

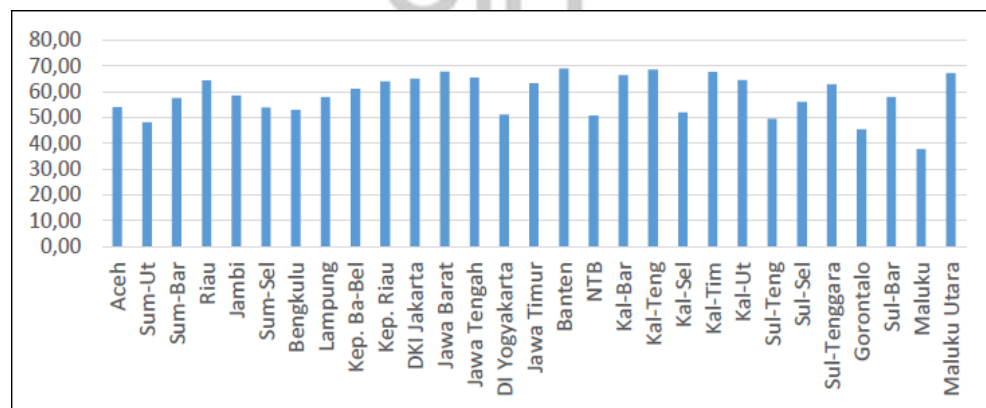
¹⁷ Badan Pusat Statistik, *Jawa Barat 2020-2024* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2025).

¹⁸ Anto, “Introducing an Islamic Human Development Index (I-HDI) to Measure Development in OIC Countries.” 88-89

¹⁹ A I I M Al-Syātibī, *Al-Mustashfā min ‘Ilm al-Uṣūl (Jil. 1)* (Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1997), 2:324-325.

Teori *maqāṣid sharī'ah* (tujuan-tujuan hukum Islam) karya Imam Al-Shatibi, yang menyatakan bahwa lima unsur kebutuhan dasar manusia adalah agama (*dīn*), jiwa (*naḥs*), akal (*‘aql*), keluarga dan keturunan (*nasl*), serta kekayaan materi (*māl*), merupakan landasan yang menjadi dasar pengukuran I-HDI. Kesenangan sejati dalam hidup tidak dapat terwujud sepenuhnya jika salah satu dari kelima aspek ini tidak terpenuhi atau terpenuhi secara tidak seimbang. Dimensi-dimensi ini merupakan kebutuhan dasar manusia.²⁰

Menurut penelitian tersebut, Indonesia menempati peringkat ke-18 di antara seluruh negara-negara OKI dengan I-HDI (*Islamic-Human Development Index*) yaitu sebesar 58.²¹ Hal ini menunjukkan bahwa dengan posisi I-HDI di Indonesia masih tertinggal sangat jauh dibandingkan dengan negara –negara OKI lainnya. Padahal Indonesia adalah negara dengan mayoritas umat muslim terbesar didunia, dan bahkan negara tetangga seperti Malaysia dan Brunei Darussalam yang telah menduduki urutan ke -10 besar I-HDI. Berikut gambar *I-HDI* menurut data Provinsi tahun 2020 menggunakan metode dari M.B Hendie Anto, yaitu dapat dilihat sebagai berikut:²²



Gambar 1.1 Data Tingkat Human Development Index Di Indonesia:
Sumber : BPS Indonesia, DJPK Kemenkeu, dan Kemenkes RI (data diolah)

²⁰ Al-Syāṭibī, *Al-Mustashfā*, 2:324-325.

²¹ Anto, "Introducing an Islamic Human Development Index (I-HDI) to Measure Development in OIC Countries," 2011., 75.

²² Anto, *Introducing an Islamic*, 7.

Tampak jelas dari grafik berikut bahwa dari 29 provinsi yang menjadi objek penelitian ini, untuk pencapaian yang dihasilkan jauh berbeda dengan HDI. Pada perhitungan I-HDI tahun 2020,²³ dibandingkan dengan nilai HDI provinsi yang sudah didominasi dengan kategori tinggi, provinsi dengan nilai I-HDI rendah ternyata yang lebih mendominasi yaitu sebanyak 15 provinsi, sedangkan I-HDI yang termasuk kategori sedang sebanyak 14 provinsi.²⁴ Adapun untuk kategori tinggi dan sangat tinggi tidak ada satu pun provinsi yang mencapainya pada tahun tersebut.

Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia dan merupakan negara dengan populasi terbesar keempat di dunia. Menurut data BPS, dari total populasi Indonesia sebanyak 272,23 juta jiwa, sebanyak 236,53 juta jiwa (86,88%) di antaranya beragama Islam.²⁵ Akibatnya, Islam menjadi agama mayoritas di beberapa wilayah di Indonesia dan dalam hal ini menjadikan penelitian ini dapat lebih mencerminkan penggunaan metode maqashid syariah pada I-HDI. Oleh karena itu, penggunaan variabel HDI yang merupakan Indonesia 2023-2024 mencapai angka 0,74,23 atau naik 0.008 poin dari IPM Indonesia di tahun sebelumnya. Dengan demikian, Indonesia naik peringkat dari urutan 114 ke 112 maka, pada penelitian ini digantikan oleh I-HDI karena dinilai sudah kompatibel dan komprehensif yang relevan dengan penduduk mayoritas muslim di Indonesia terutama Jawa Barat.²⁶

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tinggi merupakan landasan bagi terbentuknya karakter bangsa yang kuat, karena IPM berfungsi sebagai infrastruktur tak berwujud yang mendukung pencapaian tujuan-tujuan negara dalam pembangunan ekonomi sebuah negara. Selaras dengan ungkapan

²³ Muhammad Reza, Yulius Dhrma, dan Hijri Juliansyah, "The Effect Of Islamic Human Development Index on Poverty Level in Bireuen District Period 2000-2017," *Journal of Maliksussaleh Public Economics* 1, no. 2 (2018): 35–43.

²⁴ Rafsanjani, *Islamic Human Development Index Di Indonesia*.

²⁵ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, *Welfare Indicators of Jawa Barat 2016*, diakses pada 19 Juli 2025.

²⁶ Reza, Dhrma, dan Juliansyah, "The Effect Of Islamic Human Development Index on Poverty Level in Bireuen District Period 2000-2017."

Mahbud Ul Haq,²⁷ Menurut pendiri I-HDI, tujuan pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk hidup panjang, sehat, dan sejahtera.²⁸

Berdasarkan indikator I-HDI menurut Anto, ...indikator yang menilai pertumbuhan manusia dari sudut pandang Islam. I-HDI mengukur tingkat kesejahteraan manusia yang dicapai melalui pemenuhan kebutuhan dasar, sehingga memungkinkan manusia untuk hidup bahagia baik di dunia maupun di akhirat (*falah*).²⁹ Kelima unsur ini merupakan kebutuhan dasar manusia, yang harus dipenuhi agar seseorang dapat menjalani kehidupan yang bahagia baik di dunia ini maupun di akhirat. Kesenangan sejati dalam hidup tidak dapat terwujud sepenuhnya jika salah satu dari kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi atau terpenuhi secara tidak seimbang.

Indeks Pembangunan Manusia Islam (I-HDI), yang dikembangkan oleh M.B. Hendrie Anto (2009), digunakan dalam penelitian ini sebagai indikator pembangunan manusia yang lebih komprehensif guna mengatasi kendala tersebut. Lima dimensi *maqashid syariah*—*hifdzu al-din* (agama), *hifdzu al-nafs* (kehidupan/jiwa), *hifdzu al-aql* (akal), *hifdzu al-nasl* (keturunan), dan *hifdzu al-maal* (kekayaan)—mewakili kebutuhan dasar manusia sebagaimana dipahami oleh Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Shatibi. I-HDI mencakup aspek keluarga dan agama sebagai penanda kesejahteraan secara keseluruhan (*falah*), berbeda dengan HDI tradisional yang hanya menilai tiga kategori (kesehatan, pendidikan, dan tingkat kehidupan yang layak). Akibatnya, I-HDI merupakan alat yang lebih baik untuk mengevaluasi kemajuan manusia di provinsi-provinsi

²⁷ Ul-Haq dan Sen, *Human Development Report*, lihat juga Human Development Index.

²⁸ Almizan, "Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 1, no. 2 (2016): 203–22, <https://ejournal.uinib.ac.id/febi/index.php/maqdis/article/view/46>.

²⁹ Ericka Nora Vinta dan Norma Rosyidah, "Analysis of the Islamic Human Development Index (I-HDI), Economic Growth and Unemployment Rate on Poverty in Indonesia for the 2013-2021 period," in *International Conference on Islamic Economics and Business* (Kudus: Institut gama Islam Negeri Kudus, 2023), 223, <https://proceeding.uinsuku.ac.id/index.php/ICONIEB/article/view/496>.

dengan mayoritas penduduk Muslim, seperti Jawa Barat, karena mencakup pencapaian sosial dan spiritual selain pencapaian material."

Tabel 1.1 Indikator I-HDI

Tujuan Pembangunan	Dimensi	Komponen
Masalah	<i>Faith Index</i>	• <i>tingkat kriminalitas</i>
	<i>Life Index</i>	• <i>Rata-rata Usia harapan hidup,</i>
	<i>Science Index</i>	• <i>AHLS, RLS</i>
	<i>Family Social Index</i>	• <i>Tingkat kemiskinan</i>
	<i>Property Index</i>	• <i>Laju Pertumbuhan Ekonomi, Nilai PDB, Laju Pertumbuhan Penduduk, dan Tingkat Ketimpangan (Rasio Gini)</i> <i>Laju Pertumbuhan Ekonomi, Nilai PDB, Laju Pertumbuhan Penduduk, dan Tingkat Ketimpangan (Rasio Gini).</i>

Sumber : MB Hendri Anto,2009

Sebuah indeks representatif telah dikembangkan untuk masing-masing dari kelima indikator ini. Kelima dimensi tersebut diukur menggunakan indeks yang disarankan: indeks *ad-dien*, yang mewakili dimensi keagamaan; indeks *an-nafs*, yang mewakili dimensi umur panjang dan kesehatan; indeks *al-‘aql*, yang mewakili dimensi pengetahuan; indeks *an-nasl*, yang mewakili dimensi keluarga dan garis keturunan; serta indeks *al-māl*, yang mewakili dimensi pendapatan. Indikator-indikator yang diusulkan oleh MB ditampilkan pada Tabel 1.2 di bawah ini. Anto dalam hal kesehatan secara keseluruhan.³⁰

Tabel 1.2 Indikator yang diusulkan dalam Kesejahteraan Holistik³¹

³⁰ Anto, "Introducing an Islamic Human Development Index (I-HDI) to Measure Development in OIC Countries," 2011., 77.

³¹ Anto, Introducing an Islamic, 78.

Kesejahteraan	Dimensi	Indeks dimensi	Indikator Terukur
Kesejahteraan Material Index (WMI)	<i>Hifz Māl (Property Index)</i>	<i>Index Māl</i>	1. Pengeluaran perkapita disesuaikan (PPP Rupiah). 2. Rasio Gini 3. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan Keparahan Kemiskinan (P2) pertumbuhan ekonomi
Kesejahteraan Non-Material Index (WNMI)	<i>Hifz Nasl (Family social Index)</i>	<i>Indeks Nasl</i>	1. Angka kelahiran total 2. Angka kematian bayi 3. tingkat perceraian
	<i>Hifz din (Faith Index)</i>	<i>Indeks din</i>	1. Angka kriminalitas 2. jumlah masjid 3. zakat 4. haji
	<i>Hifz 'aql (Science Index)</i>	<i>Indeks' aql</i>	1. Harapan Lama Sekolah 2. Rata-Rata Lama Sekolah
	<i>Hifz Nafs (Life Index)</i>	<i>Indeks Nafs</i>	1. Angka harapan hidup 2. Tingkat Penggunaan Narkoba 3. Tingkat Pengguna Merokok

Sumber: MB.Hendri Anto, 2009. *Introduction an Islamic Human Development Index (I-HDI) to Measure Developmen in OIC Countries*.

Pengeluaran riil per kapita tahunan yang telah disesuaikan (berdasarkan harga konstan tahun 2012) merupakan indikator tingkat kehidupan. Penduduk Jawa Barat menghabiskan Rp 11,70 juta per tahun untuk pengeluaran riil per kapita yang telah disesuaikan pada tahun 2023. Angka ini adanya kenaikan Rp 418 ribu (3,71 persen) dibandingkan tahun 2022, lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan pengeluaran riil per kapita tahun 2020-2022 yang sebesar 1,98 persen per tahun. Berdasarkan data kemiskinan di Jawa Barat:

Tabel 1.3 Tingkat Kemiskinan Di Jawa Barat 2020-2023
yaitu sebagai berikut:

No.	Tahun	Jumlah kemiskinan (%)
1.	2020	8,43%
2.	2021	8,40%
3.	2022	7,98%

4.	2023	7,62%
5.	2024	7,46%

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat

Berdasarkan statistik di atas, tren tingkat kemiskinan di Jawa Barat menunjukkan perlambatan yang stabil dari tahun 2020 hingga 2023, data ini menunjukkan bahwa gejala kontraksi ringan terutama dalam problematika pembangunan ekonomi merupakan sebuah tantangan yang seharusnya memberikan gambaran bahwa data tersebut harus menurun secara signifikan. apabila perkembangannya lambat maka akan menyebabkan pada tingkat kesejahteraan, baik pada kesehatan, pendidikan, daya beli masyarakat akan semakin menurun. sehingga akan memperburuk keadaan masyarakat kelas bawah yang cukup besar dampaknya dari problematika kemiskinan, terutama pada jenis kemiskinan struktural.³²

Problematikan Kemiskinan Struktural, Pengangguran, dan Salah satu kendala utama adalah tingkat pendidikan di Jawa Barat dan Indonesia, sebagaimana diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia peningkatan I-HDI di Indonesia, termasuk di Jawa Barat.³³ Data data BPS (2023) menunjukkan bahwa 10,86% penduduk Indonesia (29,9 juta orang) tetap berada di bawah garis kemiskinan, dengan Jawa Barat menyumbang sekitar 4,6 juta orang (8,96%).³⁴ Kemiskinan ini bersifat struktural, ditandai dengan ketimpangan akses terhadap lapangan kerja formal dan kesenjangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan.³⁵

Pada bulan Maret 2024, terdapat 25,22 juta orang miskin di Indonesia. Dibandingkan Maret 2023, jumlah penduduk miskin menurun 0,68 juta orang. Sementara jika dibandingkan dengan September 2022, jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 1,14 juta orang. Persentase penduduk miskin pada

³² Irfan Sauqi Beik dan Laili Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, 1 ed. (Bogor: IPB Press, 2015), 127.

³³ Badan Pusat Statistik, *Indonesia dalam Angka Kemiskinan* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2025), diakses 21 Mei 2025. www.bps.go.id.

³⁴ Badan Pusat Statistik, *Indonesia dalam Angka*.

³⁵ Badan Pusat Statistik, *Indonesia dalam Angka*, diakses 19 Juli 2025.

Maret 2024 tercatat sebesar 9,03 persen, menurun 0,33 persen poin terhadap Maret 2023 dan menurun 0,54 persen poin terhadap September 2022. Berdasarkan daerah tempat tinggal, Antara Maret 2023 dan Maret 2024, terjadi penurunan jumlah penduduk miskin perkotaan sebesar 0,1 juta orang dan penurunan jumlah penduduk miskin pedesaan sebesar 0,58 juta orang. Tingkat kemiskinan perkotaan turun dari 7,29 persen menjadi 7,09 persen. Sementara itu, di pedesaan turun dari 12,22 persen menjadi 11,79 persen.³⁶

Tingkat kemiskinan di Indonesia masih relatif tinggi dan menjadi salah satu problematika pembangunan ekonomi terutama Jawa Barat memiliki tingkat kemiskinan tertinggi kedua, hanya kalah dari Jawa Timur, menurut komponen standar hidup yang layak dalam Indeks Pembangunan Manusia, yang mengukur kualitas hidup manusia. yaitu Jawa Barat mencapai 7,46% per September 2024 masih di bawah rata-rata nasional yang sebesar 8,57%.³⁷

Problematika Kemiskinan Struktural, Pengangguran, dan Kualitas Pendidikan Jawa Barat merupakan hambatan utama dalam upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia Indonesia, termasuk di Jawa Barat.³⁸ Menurut data BPS tahun 2023, 29,9 juta orang, atau 10,86% dari total penduduk Indonesia, masih hidup dalam kemiskinan, di mana 4,6 juta di antaranya (8,96%) adalah penduduk Jawa Barat.³⁹ Kemiskinan ini bersifat struktural, ditandai dengan ketimpangan akses terhadap lapangan kerja formal dan kesenjangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan.⁴⁰ Ketimpangan ekonomi antara wilayah maju dan tertinggal, minimnya penyerapan tenaga kerja berkualitas, serta kesenjangan akses pendidikan dan kesehatan mencerminkan kegagalan transformasi pertumbuhan ekonomi dalam menjamin pemerataan kesejahteraan.⁴¹

³⁶ Badan Pusat Statistik, *Indonesia dalam Angka*, diakses 21 Mei 2025.

³⁷ Badan Pusat Statistik, *Indonesia dalam Angka*, diakses 14 Mei 2026.

³⁸ Badan Pusat Statistik, *Indonesia dalam Angka*, diakses 21 Mei 2025.

³⁹ Badan Pusat Statistik, *Indonesia dalam Angka*, diakses 22 Mei 2025.

⁴⁰ Badan Pusat Statistik, diakses 22 Mei 2025.

⁴¹ Reza, Dhrma, dan Juliansyah, "The Effect Of Islamic Human Development Index on Poverty Level in Bireuen District Period 2000-2017."

Disparitas pembangunan antara Jawa dan luar Jawa, dominasi sektor informal dengan produktivitas rendah, serta ketergantungan pada sumber daya alam yang rentan gejolak pasar global semakin memperparah kondisi ini. Selain itu, lambatnya peningkatan IPM Indonesia (hanya naik 0,74 poin dalam 5 tahun terakhir) menunjukkan bahwa pembangunan belum sepenuhnya berorientasi pada peningkatan kapasitas manusia (*human-centered development*), melainkan masih terfokus pada pertumbuhan makro yang tidak inklusif. Jika tidak diatasi melalui kebijakan holistik seperti penguatan industri padat karya, reformasi pendidikan vokasi, dan perlindungan sosial berbasis kelompok rentan maka target Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi dan mencapai SDGs 2030 akan sulit terwujud.

Tingkat kemiskinan yang tinggi di Jawa Barat yang menempatkan provinsi ini di peringkat kedua di tingkat nasional setelah Jawa Timur dalam hal jumlah total penduduk miskin kini menjadi hambatan utama bagi pembangunan manusia. Fenomena ini diperburuk oleh adanya disparitas ekonomi dan sosial yang tajam antara wilayah rural dan urban, tercermin dari indeks keparahan kemiskinan di daerah seperti Indramayu yang mencapai 11,93%, jauh melampaui wilayah perkotaan seperti Kota Bandung.⁴²

Ketimpangan akses terhadap lapangan kerja formal, pendidikan, dan kesehatan antara wilayah maju dan tertinggal menunjukkan bahwa pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tradisional yang tinggi di tingkat provinsi belum mampu menjamin kesejahteraan yang inklusif dan adil bagi semua kelompok masyarakat.

Selain problematika ekonomi, Jawa Barat juga mengalami degradasi sosial yang signifikan, yang ditandai dengan lonjakan angka kriminalitas dari 19.375 pada tahun 2020 menjadi 45.689 pada tahun 2024. Kenaikan tajam angka kejahatan ini merupakan tanda rendahnya tingkat pencapaian dimensi pada indeks pembangunan manusia secara konvensional, khususnya dalam

⁴² Badan Pusat Statistik, *Indonesia dalam Angka Kemiskinan*, diakses 17 Mei 2026.

aspek pemeliharaan *faith index*, *life index* dan *property index*. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif terhadap pembangunan dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia Islam (*Islamic-Human Development Index I-HDI*) untuk menganalisis sejauh mana pertumbuhan ekonomi dapat diintegrasikan dengan nilai-nilai religiusitas guna mengatasi akar masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial secara holistik di Jawa Barat.

Berbagai problematika di Jawa Barat, mulai dari tingginya angka kemiskinan peringkat kedua nasional hingga lonjakan angka kriminalitas yang mencapai 45.689 kasus pada tahun 2024, menunjukkan bahwa indikator pembangunan konvensional IPM tidak lagi cukup kompatibel untuk memotret kesejahteraan masyarakat secara utuh. IPM konvensional dinilai memiliki kelemahan karena hanya berfokus pada dimensi material dan mengabaikan unsur religiusitas yang menjadi fondasi utama masyarakat Muslim. Oleh karena itu, penggunaan I-HDI yang digagas oleh Muhammad Boedi Hendrie Anto (2009) menjadi urgensi dalam penelitian ini sebagai alat ukur pembangunan manusia yang lebih akurat, inklusif, dan mampu menyeimbangkan aspek duniawi dengan pencapaian kebahagiaan hakiki atau *falah*.

Solusi komprehensif yang ditawarkan I-HDI terletak pada integrasi lima komponen utamanya yang mampu menyentuh akar permasalahan di Jawa Barat secara spesifik. Pertama, *Faith Index* hadir untuk mengukur penguatan kontrol sosial dan religiusitas guna menekan angka kriminalitas, Kedua, *Property Index* berfungsi membedah masalah kemiskinan, ketimpangan ekonomi (rasio gini), dan daya beli masyarakat secara lebih adil. Ketiga, *Life Index* menjadi instrumen untuk memantau kualitas hidup dan kesehatan melalui angka harapan hidup serta pencegahan perilaku menyimpang seperti penggunaan narkoba. Keempat, *Science Index* berperan dalam mendorong peningkatan kapasitas intelektual melalui rata-rata lama sekolah dan penguatan lembaga pendidikan. Terakhir, *Family Social Index* digunakan untuk menjaga stabilitas sosial dan keberlanjutan generasi melalui pemantauan angka kelahiran dan angka harapan hidup. Melalui sinergi kelima indeks ini, pembangunan di

Jawa Barat tidak lagi hanya mengejar pertumbuhan makro, melainkan bertransformasi menuju pembangunan yang berfokus pada manusia (*human-centered development*) yang holistik

Alasan utama dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk mengangkat objek ini berdasarkan hasil identifikasi awal terhadap fenomena dan permasalahan yang semakin kompleks yang terjadi di provinsi Jawa Barat, antara lain:

1. Tingkat Religiusitas di Jawa Barat merupakan tantangan bagi kesejahteraan masyarakat secara universal, karena berdasarkan data yang diperoleh berdasarkan indikator religiusitas melalui *faith index* diperoleh dari data tingkat kriminalitas yaitu Tingkat kriminalitas di Jawa Barat menunjukkan tren yang meningkat secara drastis, khususnya dari tahun 2023 ke 2024 dengan lonjakan sekitar 8.054 kasus.⁴³
2. Ketimpangan pertumbuhan ekonomi menjadi masalah krusial di Jawa Barat. dari meningkat pertumbuhan ekonomi dan sosial yang melambat selama tahun 2020-2024, pertumbuhan tersebut tidak selalu inklusif dan berdampak tidak merata pada peningkatan I-HDI. fenomena ini terlihat dari adanya disparitas spasial yang tajam, di mana wilayah seperti Indramayu masih memiliki tingkat kemiskinan sebesar 11,93% pada tahun 2024, berbanding terbalik dengan wilayah urban seperti Kota Bandung yang hanya sebesar 3,87%, Pertumbuhan yang tidak merata ini juga diikuti oleh melambatnya indikator sosial, yang tercermin dari lonjakan angka kriminalitas yang sangat drastis dari 19.375 kasus di tahun 2020 menjadi 45.689 kasus pada 2024,⁴⁴ serta perkembangan stagnan pada Science Index yang ditandai oleh pertumbuhan rata-rata lama sekolah yang lambat, Situasi ini menegaskan bahwa pembangunan yang semata-mata berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tanpa akses yang adil terhadap pendidikan, kesehatan, dan penguatan nilai religiusitas (*Faith Index*) akan

⁴³ Badan Pusat Statistik, Indonesia dalam Angka, diakses 21 Mei 2026.

⁴⁴ Badan Pusat Statistik, *Indonesia dalam Angka Kemiskinan*, diakses 17 Mei 2026.

menghambat pencapaian pembangunan manusia yang holistik (falshah) di Jawa Barat.

3. Penurunan kemiskinan yang belum merata memengaruhi dinamika I-HDI, mengingat Jawa Barat masih menempati peringkat kedua dengan jumlah penduduk miskin terbanyak nasional setelah Jawa Timur. Meskipun persentase kemiskinan turun menjadi 7,46% pada 2024 disparitas tajam tetap terjadi antara wilayah rural seperti Indramayu (11,93%) dengan urban seperti Kota Bandung (3,87%). Kondisi ini mengindikasikan program pengentasan kemiskinan belum optimal menjangkau pelosok, sehingga tantangan kemiskinan struktural dan multidimensi masih menghambat peningkatan I-HDI secara inklusif.⁴⁵
4. Data pendidikan menunjukkan bahwa antara tahun 2020 dan 2024, rata-rata lama pendidikan di Jawa Barat berkisar antara 8 hingga 10 tahun, dengan kelompok usia muda (15-24 tahun) sebagai penyumbang terbesar. Tingginya pengangguran usia produktif ini menghambat peningkatan rata-rata lama sekolah, salah satu komponen kunci I-HDI. Selain itu, dominasi sektor informal dengan upah rendah juga membatasi peningkatan pengeluaran per kapita, yang pada akhirnya memengaruhi daya beli dan kesejahteraan masyarakat.
5. Interdependensi antarvariabel, religiusitas, kemiskinan, dan kesehatan dan pendidikan menggambarkan hubungan yang rumit antara pembangunan manusia dan kemakmuran ekonomi dalam perspektif syariah yaitu pada I-HDI. Analisis hubungan antara, tingkat religiusitas, kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan, terhadap I-HDI di Jawa Barat mengungkapkan bahwa pembangunan manusia memerlukan pendekatan multidimensi. Pertumbuhan ekonomi saja tidak cukup jika tidak diiringi pemerataan hanya oleh akses pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan yang berkualitas dan terpenuhi secara fundamental.

⁴⁵ Badan Pusat Statistik, *Indonesia dalam Angka*, diakses 17 Mei 2026.

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat kita lihat masih tingginya ketimpangan yang terjadi di Jawa Barat antara wilayah rural dengan urban yang menjadikan masalah utama dalam pembangunan manusia. Judul Berdasarkan hasil penelusuran literatur, hal ini memiliki ketertarikan tersendiri agar para peneliti dapat mengidentifikasi dan mengkaji sejauh mana kemiskinan, harapan hidup, rata-rata lama bersekolah, dan tingkat keagamaan memengaruhi I-HDI di Jawa Barat.

Adapun Gagasan utama disertasi ini adalah membangun model Pembangunan manusia berbasis Maqasid Syariah (I-HDI), yang memadukan aspek material dan spiritual, serta menguji secara empiris pengaruh religiusitas, kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan terhadap I-HDI dengan menggunakan perkembangan ekonomi Provinsi Jawa Barat sebagai variabel perantara untuk periode tahun 2020–2024.

"Pembangunan manusia di masyarakat mayoritas Muslim tidak cukup diukur dengan indikator konvensional (HDI) yang hanya berfokus pada aspek material, tetapi membutuhkan pendekatan holistik berbasis maqashid syariah (I-HDI) yang menyeimbangkan pencapaian duniawi dan *ukhrawi (falah)*, di mana dimensi fundamental seperti religiusitas dan keadilan distributif memiliki pengaruh langsung terhadap kesejahteraan yang tidak dapat disubstitusi oleh perkembangan pada ekonomi semata."

Bertitik tolak dari argumen di atas, objek tersebut diangkat menjadi fokus utama penelitian dengan judul: **Pengaruh Religiusitas, Kemiskinan, Kesehatan, dan Pendidikan, Terhadap I-HDI di Provinsi Jawa Barat Melalui Pertumbuhan Ekonomi Periode 2020-2024.**

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Religiusitas (X_1) berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Z) di Provinsi Jawa Barat pada periode 2020-2024?
2. Apakah Kemiskinan (X_2) berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Z) di Provinsi Jawa Barat pada periode 2020-2024?
3. Apakah Kesehatan (X_3) berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan

Ekonomi (Z) di Provinsi Jawa Barat pada periode 2020-2024?

4. Apakah Pendidikan (X_4) berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Z) di Provinsi Jawa Barat pada periode 2020-2024?
5. Apakah Religiusitas (X_1) berpengaruh signifikan langsung terhadap *Islamic-Human Development Index* (I-HDI) (Y) di Provinsi Jawa Barat pada periode 2020-2024?
6. Apakah Kemiskinan (X_2) berpengaruh signifikan langsung terhadap *Islamic-Human Development Index* (I-HDI) (Y) di Provinsi Jawa Barat pada periode 2020-2024?
7. Apakah Kesehatan (X_3) berpengaruh signifikan langsung terhadap *Islamic-Human Development Index* (I-HDI) (Y) di Provinsi Jawa Barat pada periode 2020-2024?
8. Apakah Pendidikan (X_4) berpengaruh signifikan langsung terhadap *Islamic-Human Development Index* (I-HDI) (Y) di Provinsi Jawa Barat pada periode 2020-2024?
9. Apakah Pertumbuhan Ekonomi (Z) berpengaruh signifikan terhadap *Islamic-Human Development Index* (I-HDI) (Y) di Provinsi Jawa Barat pada periode 2020-2024?
10. Apakah Pertumbuhan Ekonomi (Z) memediasi pengaruh Religiusitas (X_1) terhadap *Islamic-Human Development Index* (I-HDI) (Y) di Provinsi Jawa Barat pada periode 2020-2024?
11. Apakah Pertumbuhan Ekonomi (Z) memediasi pengaruh Kemiskinan (X_2) terhadap *Islamic-Human Development Index* (I-HDI) (Y) di Provinsi Jawa Barat pada periode 2020-2024?
12. Apakah Pertumbuhan Ekonomi (Z) memediasi pengaruh Kesehatan (X_3) terhadap *Islamic-Human Development Index* (I-HDI) (Y) di Provinsi Jawa Barat pada periode 2020-2024?
13. Apakah Pertumbuhan Ekonomi (Z) memediasi pengaruh Pendidikan (X_4) terhadap *Islamic-Human Development Index* (I-HDI) (Y) di Provinsi Jawa Barat pada periode 2020-2024?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis, dan menguji pengaruh Religiusitas (X_1) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Z) di Provinsi Jawa Barat pada periode 2020-2024.
2. Untuk menganalisis, dan menguji pengaruh kemiskinan (X_2) terhadap pertumbuhan ekonomi (Z) di Provinsi Jawa Barat pada periode 2020-2024.
3. Untuk menganalisis, dan menguji pengaruh kesehatan (X_3) terhadap pertumbuhan ekonomi (Z) di Provinsi Jawa Barat pada periode 2020-2024.
4. Untuk menganalisis, dan menguji pengaruh Pendidikan (X_4) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Z) di Provinsi Jawa Barat pada periode 2020-2024.
5. Untuk menganalisis, dan menguji pengaruh langsung Religiusitas (X_1) terhadap *Islamic-Human Development Index* (I-HDI) (Y) di Provinsi Jawa Barat pada periode 2020-2024.
6. Untuk menganalisis, dan menguji pengaruh langsung kemiskinan (X_2) terhadap *Islamic-Human Development Index* (I-HDI) (Y) di Provinsi Jawa Barat pada periode 2020-2024.
7. Untuk menganalisis, dan menguji pengaruh langsung kesehatan (X_3) terhadap *Islamic-Human Development Index* (I-HDI) (Y) di Provinsi Jawa Barat pada periode 2020-2024.
8. Untuk menganalisis, dan menguji pengaruh langsung pendidikan (X_4) terhadap *Islamic-Human Development Index* (I-HDI) (Y) di Provinsi Jawa Barat pada periode 2020-2024.
9. Untuk menganalisis, dan menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi (Z) terhadap *Islamic-Human Development Index* (I-HDI) (Y) di Provinsi Jawa Barat pada periode 2020-2024.
10. Untuk menganalisis, dan menguji apakah pertumbuhan ekonomi (Z) memediasi pengaruh religiusitas (X_1) terhadap *Islamic-Human Development Index* (I-HDI) (Y) di Provinsi Jawa Barat pada periode 2020-2024.
11. Untuk menganalisis, dan menguji apakah Pertumbuhan Ekonomi (Z)

memediasi pengaruh Kemiskinan (X_2) terhadap *Islamic-Human Development Index* (I-HDI) (Y) di Provinsi Jawa Barat pada periode 2020-2024.

12. Untuk menganalisis, dan menguji apakah pertumbuhan ekonomi (Z) memediasi pengaruh kesehatan (X_3) terhadap *Islamic-Human Development Index* (I-HDI) (Y) di Provinsi Jawa Barat pada periode 2020-2024.

13. Untuk menganalisis, dan menguji apakah Pertumbuhan Ekonomi (Z) memediasi pengaruh pendidikan (X_4) terhadap *Islamic-Human Development Index* (I-HDI) (Y) di Provinsi Jawa Barat pada periode 2020-2024.

D. Manfaat Penelitian

Sebagaimana ditunjukkan di bawah ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis:

Manfaat teoritik adalah manfaat untuk pengembangan teori-teori dengan waktu lama dan panjang dalam bidang tertentu.

- a. Pengembangan Teori Indeks Pembangunan Manusia dalam persepektif syariah Penelitian ini memperluas penerapan pengembangan Ilmu Ekonomi Pembangunan dengan memberikan kontribusi pada literatur I-HDI dengan menganalisis hubungan kausal antara religiusitas, kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan terhadap I-HDI di Jawa Barat melalui pertumbuhan ekonomi periode 2020-2024.
- b. Pengembangan Teori Perencanaan Pembangunan dalam Perspektif syariah Pengembangan teori perencanaan pembangunan, khususnya terkait I-HDI, telah memberikan banyak manfaat teoritis dalam penelitian pembangunan Ekonomi. Teori IPM yang diperkenalkan oleh Mahbub ul Haq dan Amartya Sen (1990) menggeser paradigma dari pertumbuhan ekonomi (PDB/GDP) ke pendekatan berbasis kesehatan, pendidikan, dan standar hidup, dan agama yang berorientasi

dari konsep maqashid syariah. Ini memperkaya literatur pembangunan dengan konsep "*human flourishing*" (kesejahteraan manusia holistik).⁴⁶

c. Pengembangan ilmu ekonomi pembangunan

Penelitian tentang pengaruh kemiskinan, I-HDI di Jawa Barat ini memberikan sumbangsih teoretis dengan menganalisis hubungan dinamis antara variabel ekonomi tersebut dengan kualitas sumber daya manusia dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, sekaligus memperkaya kajian tentang integrasi prinsip ekonomi syariah seperti keadilan distributif, perencanaan pembangunan yang berwawasan syariah dengan menggabungkan pendekatan berbasis data dengan nilai-nilai syariah untuk menghasilkan berkelanjutan dalam upaya peningkatan I-HDI di negara Muslim khususnya di Indonesia.

d. Pengembangan Metodologi

Memberikan model analisis baru dalam mengkaji hubungan variabel ekonomi makro dengan perencanaan pembangunan ekonomi dalam ruang lingkup indeks pembangunan manusia. Mengembangkan pendekatan integratif antara analisis kuantitatif ekonomi dengan prinsip syariah.

2. Manfaat Praktis

Secara paraktis, hasil Penelitian ini memiliki manfaat langsung bagi para kepentingan terutama para Regulator dalam merumuskan berbagai kebijakan dengan pembangunan di Jawa Barat, yaitu:

a. Bagi Kebijakan Pemerintah

Rekomendasi Kebijakan Berbasis Nilai Islam, dengan Penelitian ini membantu pemerintah daerah menyusun kebijakan pembangunan yang lebih berorientasi pada meningkatkan Efektivitas Program Pembangunan yaitu dengan Menawarkan perspektif baru

⁴⁶ Amartya Sen, "Introduction," in *Human Development Report 2010: The Real Wealth of Nations* (New York: UNDP, 2010), 1-5.

dalam mengevaluasi program-program pembangunan di Jawa Barat, sehingga lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam. Hasil penelitian dapat menjadi dasar untuk memprioritaskan program pengentasan kemiskinan (misalnya: bantuan sosial, pelatihan kerja) di daerah dengan I-HDI rendah. Evaluasi Program Pembangunan yaitu dengan Membantu menilai efektivitas program seperti Jabar Juara, Kartu Sakti, atau Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan I-HDI dan mengurangi pengangguran. Memetakan apakah pertumbuhan pendapatan per kapita benar-benar berkorelasi dengan peningkatan I-HDI.

b. Bagi Institusi

Semakin banyaknya penelitian mengenai hubungan antara kualitas hidup manusia (I-HDI) dan pertumbuhan ekonomi (pendapatan per kapita) pada ruang lingkup regional dan nasional, serta menjadi referensi bagi perguruan tinggi dan lembaga penelitian dalam pengembangan model pembangunan manusia berbasis data, serta memberikan masukan berharga bagi lembaga syariah dan organisasi kemasyarakatan dalam mendesain program pemberdayaan yang mengintegrasikan pendekatan ekonomi syariah dengan pembangunan berkelanjutan dalam ruang lingkup indeks pembangunan manusia.

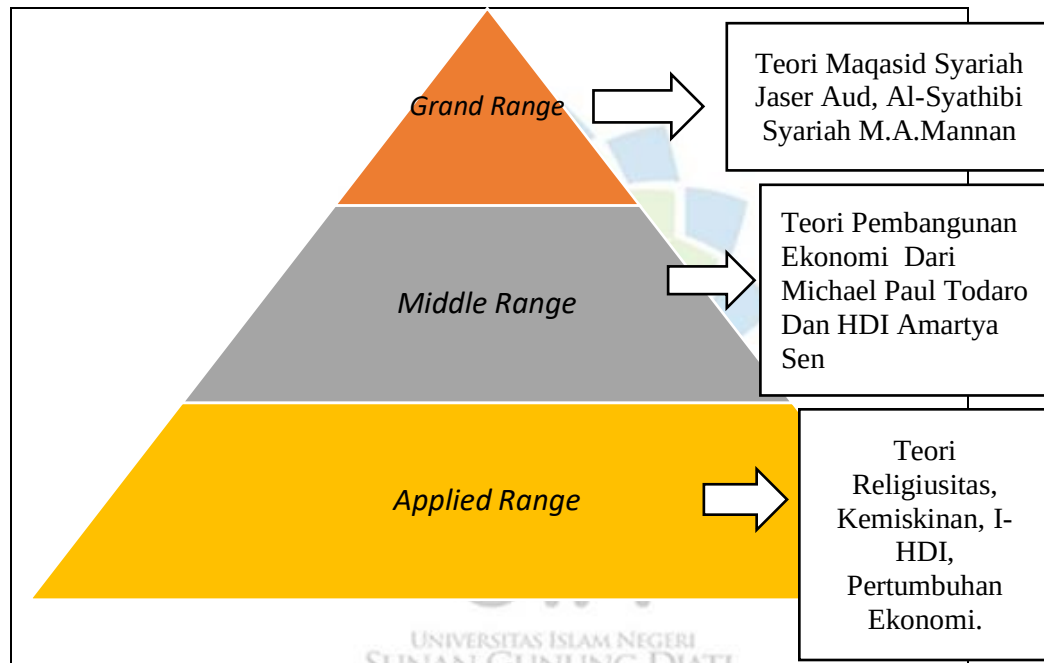
c. Bagi Masyarakat

Kesadaran Masyarakat dan Pelaku Ekonomi dapat Mendorong masyarakat dan pelaku ekonomi untuk lebih memahami pentingnya pembangunan ekonomi dalam merancang program pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, atau kebijakan pendapatan yang berdampak langsung pada peningkatan I-HDI.

E. Kerangka Pemikiran

Rancangan konseptual akan digunakan pada penelitian ini terdiri dari tiga landasan teori yaitu teori utama yang bersipat universal (*grand theory*),

teori penengah (*middle theory*) yang berfungsi menjelaskan masalah penelitian; dan aplikatif teori (*applicative theory*) untuk menjelaskan operasionalisasi teori dalam masalah yang menjadi objek penelitian sehingga jelaslah karakteristik objek yang diteliti tersebut. di dalam kerangka pemikiran ini berikut piramida *logical framework thinking* pada penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 1.2 Kerangka Pemikiran⁴⁷

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dibangun atas tiga tingkatan teori (*grandrange, middle range, applied range*) yang saling terintegrasi secara hierarkis.

1. *Grand Range Theory*

Teori pada level ini bersifat fundamental dan universal, menjadi landasan filosofis bagi seluruh penelitian. Grand theory yang digunakan terdiri atas:

- a. Tujuan utama Syariah, menurut kitab Maqasid Syariah karya Al-Shatibi, adalah melindungi lima kebutuhan pokok (*al-daruriyyat al-khamsah*):

⁴⁷ Todaro dan Smith, *Economic Development*; Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*; Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah: A Beginner's Guide*, ed. oleh Anas S Al Shaikh-Ali Shiraz Khan, 12 ed. (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008); Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, *Dawābiṭ al-Maṣlahah fī al-Sharī'ah al-Islāmiyyah* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1986).

agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*). Untuk mencapai kesejahteraan sejati (*falah*) baik di dunia maupun di akhirat, kelima kebutuhan ini merupakan hal yang mutlak.

- b. Maqashid Syariah Jasser Auda yang mengembangkan pendekatan sistem (systems approach) dengan enam fitur utama: cognitive nature, wholeness, openness, interrelated hierarchy, multi-dimensionality, dan purposefulness. Auda menggeser paradigma maqashid dari sekadar perlindungan (*protection*) menuju pengembangan (*development*) dan hak asasi manusia.
- c. Filosofi Pembangunan Ekonomi Khurshid Ahmad yang merumuskan empat pilar fundamental: tauhid (keesaan Tuhan), *rububiyyah* (ketuhanan yang mengatur alam), khilafah (tanggung jawab manusia sebagai wakil Allah di bumi), dan *tazkiyah* (penyucian jiwa dalam hubungan vertikal dan horizontal).

2. *Middle Range Theory* (Teori Penengah)

Teori pada level ini berfungsi menjembatani grand theory dengan realitas empiris, menjelaskan mekanisme dan proses pembangunan ekonomi dalam kerangka Islam dan konvensional:

- a. Teori Pembangunan Ekonomi Islam M.A. Mannan yang menekankan keadilan distributif sebagai pusat perputaran pola produksi, serta pencapaian *falah* sebagai tujuan akhir pembangunan. Teori Pembangunan Ekonomi Umer Chapra yang mengelompokkan kekuasaan negara ke dalam tiga jenis (*tabi'i*, *siyasah aqliyah*, *siyasah diniyyah*) dan menekankan pentingnya welfare state Islami dalam mewujudkan kesejahteraan dunia dan akhirat.

- b. Teori Pembangunan Ekonomi Konvensional Michael P. Todaro yang merumuskan tiga nilai inti pembangunan: sustenance (kemampuan memenuhi kebutuhan dasar), self-esteem (harga diri), dan freedom (kebebasan dari belenggu kemiskinan).
- c. Teori *Human Development Index* (HDI) Amartya Sen dan Mahbub ul-Haq yang menggeser paradigma pembangunan dari pertumbuhan ekonomi (PDB/GNP) beralih ke strategi yang berfokus pada pendidikan, kesehatan, dan tingkat kehidupan yang layak.
- d. Teori Pertumbuhan Ekonomi Ibnu Khaldun melalui model *hikammiyah* (*eight wise principles*) Hal ini menyoroti bagaimana negara, lembaga, masyarakat, kekayaan, keadilan, dan kemajuan saling bergantung satu sama lain.

3. *Applied Range Theory* (Teori Terapan)

Teori pada level ini merupakan operasionalisasi dari grand dan middle theory ke dalam variabel-variabel terukur yang diuji secara empiris:



- a. Teori Religiusitas (*Faith Index*) yang diproksikan melalui tiga indikator: angka kriminalitas terlapor, jumlah masjid (kategori Masjid Jami'). Indikator ini merefleksikan dimensi pemeliharaan agama (*hifdzu al-din*) dalam maqashid syariah.
- b. Teori Kemiskinan (*Property Index*) yang diukur melalui persentase penduduk miskin per kabupaten/kota. Indikator ini merefleksikan dimensi pemeliharaan harta (*hifdzu al-maal*) dan keadilan distributif.
- c. Harapan Hidup saat Lahir digunakan untuk mengukur Teori Kesehatan (Indeks Kehidupan). Indikator ini merefleksikan dimensi pemeliharaan jiwa (*hifdzu al-nafs*).
- d. Teori Pendidikan (*Science Index*) ditentukan berdasarkan Rata-rata Lama Pendidikan (RLS) penduduk yang berusia di atas 25 tahun. Indikator ini merefleksikan dimensi pemeliharaan akal (*hifdzu al-aql*).
- e. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi (LPE), yang dihitung berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada harga konstan, merupakan salah satu ukuran dalam teori pertumbuhan ekonomi. Teori ini berfungsi sebagai variabel mediasi yang menjembatani pengaruh variabel independen terhadap I-HDI.
- f. Hipotesis Indeks Pembangunan Manusia Islam (I-HDI) yang dikembangkan oleh M.B. Hendrie Anto mencakup lima aspek *maqashid syariah* (*Faith Index*, *Life Index*, *Science Index*, *Family Social Index*, *Property Index*) ke dalam satu indeks komposit untuk mengukur pembangunan manusia dalam perspektif Islam. berikut penjelasan komprehensif:

1. Teori Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Syariah

Islam menempatkan manusia sebagai pusat dan sebagai pelaku utama pertumbuhan ekonomi, meskipun hal ini merupakan salah satu aspek penting

dalam kehidupan yang menarik banyak perhatian.⁴⁸ Islam sebagai agama pengatur kehidupan berperan dalam membimbing dan mengarahkan manusia dalam mengelola sumber daya ekonomi untuk mencapai kemaslahatan di dunia dan akhirat.⁴⁹ Dalam penelitian yang dilakukan oleh Handayani & Seonjoto (2020) menyatakan bahwa, sebagai agama yang mengatur segala kehidupan, Islam berperan dalam membimbing dan mengarahkan manusia dalam mengelola sumber daya ekonomi untuk memperoleh manfaat baik di dunia ini maupun di akhirat.⁵⁰

a. Muhammad Abdul Mannan

Menurut Muhammad Abdul Mannan, pembangunan ekonomi Islam merupakan suatu proses multidimensional upaya ini bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan spiritual, moral, dan sosial berdasarkan prinsip-prinsip syariah, selain juga meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan materi masyarakat. Pembangunan ekonomi dalam Islam harus mengintegrasikan aspek duniawi dan ukhrawi sehingga menghasilkan kesejahteraan yang menyeluruh (*falah*).⁵¹

Menurut Abdul Mannan, tujuan pembangunan ekonomi Islam adalah menciptakan masyarakat yang ditandai oleh keadilan, keseimbangan, dan martabat, bukan sekadar meningkatkan produksi ekonomi atau pertumbuhan pendapatan nasional, melalui distribusi kekayaan yang merata, pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan nilai-nilai agama dalam aktivitas

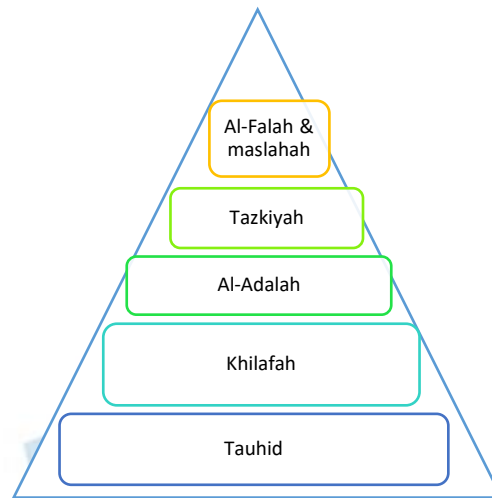
⁴⁸ Juhaya S Praja, *Teori-teori Hukum dan Aplikasinya* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), 129.

⁴⁹ Ali Rama dan Burhanuddin Yusuf, "Contruaction of islamic human development index," *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics* 32, no. 1 (2019): 43–64.

⁵⁰ Ghilman Muhammad Hifzanuddin, "Pengaruh Islamic- Human Development Index Terhadap Tingkat Kemiskinan Dan Rasio Gini Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2018" (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2019).

⁵¹ Muhammad Abdul Manan, *Muhammad Abdul Manan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 2012), h. 87 (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 2012).

ekonomi.⁵² Menurut Abdul Mannan, terdapat beberapa prinsip utama pembangunan ekonomi Islam, yaitu:



Gambar 1.3 Prinsip Utama Pembangunan Ekonomi Islam⁵³

1) Tauhid (*Unity*)

Seluruh aktivitas pembangunan harus berlandaskan keimanan kepada Allah SWT. Pembangunan merupakan sarana untuk beribadah dan mengabdikan kepada Allah SWT, selain juga bertujuan untuk memperoleh keuntungan finansial.

2) Khilafah (*Vicegerency*)

Sebagai pengelola planet ini, manusia memiliki kewajiban untuk mengelola sumber daya secara berkelanjutan, adil, dan efektif demi kepentingan semua pihak.

3) *Al-'Adalah* (Keadilan)

Pembangunan harus menghasilkan distribusi kesejahteraan yang adil serta mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat.

4) *Tazkiyah* (Penyucian Jiwa)

Selain meningkatkan kualitas materi, pembangunan juga mendorong perkembangan etika, moral, dan spiritualitas masyarakat.

⁵² Muhammad Abdul Manan.,87

⁵³ Muhammad Abdul Manan.,88

5) Masalah dan Falah

Mewujudkan kebaikan bersama dan kesejahteraan sejati (*falah*), baik di dunia maupun di akhirat, merupakan tujuan akhir dari pertumbuhan.

Menurut gagasan Abdul Mannan, pertumbuhan ekonomi Islam mengadopsi pendekatan yang berpusat pada manusia, yang menempatkan manusia sebagai inti pembangunan dan menuntut mereka untuk mencapai kesejahteraan baik secara materi maupun spiritual. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi bukanlah satu-satunya indikator pembangunan, pendidikan, kesehatan, dan pengurangan kemiskinan, tetapi juga mencakup dimensi religiusitas dan moralitas masyarakat.

Dalam penelitian ini, teori pembangunan ekonomi Islam Abdul Mannan memakai *grand theory* Syariah karena hal itu dapat menjelaskan pentingnya mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, peningkatan kualitas manusia, dan nilai-nilai religiusitas sebagai landasan tercapainya kesejahteraan manusia yang holistik (*falah*). Gagasan ini sejalan dengan Indeks Pembangunan Manusia Islam (I-HDI) yang didasarkan pada *maqashid syariah*.

b. Khursid Ahmad

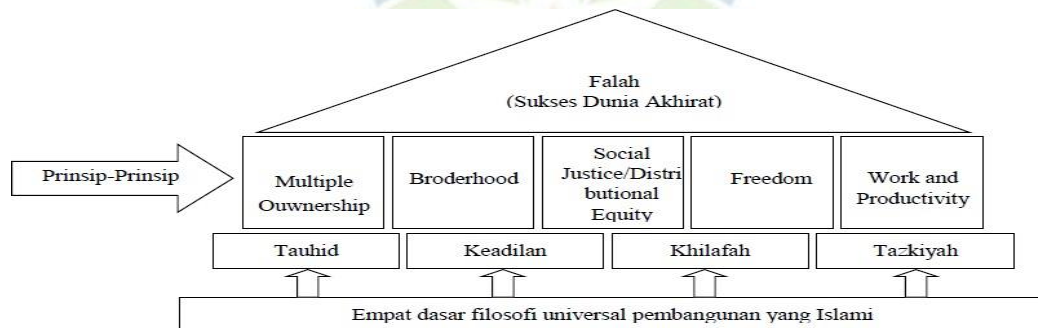
Empat pilar filosofis dari pendekatan Islam terhadap pembangunan diuraikan oleh Khurshid Ahmad dalam buku-bukunya (1980: 178–179; 1994: 19–20):

- 1) *Tawhid* (*habl min Allah dan habl min an-nas*) adalah pengakuan atas keesaan dan kekuasaan Allah, yang menjadi landasan hukum-hukum yang mengatur hubungan antara Allah dan manusia.⁵⁴
- 2) Penganut *Rububiyyah* berpendapat bahwa segala sesuatu berada di bawah ilmu, kehendak, dan hikmah Allah yang tak terbatas, Tuhan yang menciptakan alam semesta, menetapkan, memilikinya, dan

⁵⁴ Ahmad Kurshid, “*Economic Development in an Islamic Framework*,” in *Studies in Islamic Economics*, ed. oleh Kurshid Ahmad (Leicester: The Islamic Foundation and Jeddah: International Centre for Research in Islamic Economics, King Abdul Aziz University, 1980), 77.

memberinya rezeki. Mereka meyakini bahwa alam semesta dimiliki, direncanakan, diciptakan, diatur, dipelihara, diberi rezeki dan manfaat, dilindungi dari bahaya, serta dijaga oleh Allah semata, Rabb yang satu-satunya.

- 3) *Khilafah* (Pengelolaan), yang berpendapat bahwa manusia adalah wakil Allah di bumi dan bertanggung jawab kepada Allah atas pemeliharaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka serta atas pemeliharaan dan pengembangan planet ini.
- 4) *Tazkiyah* (pembersihan), yang mencakup pembersihan diri manusia dalam hubungannya dengan Allah, sesama manusia, lingkungan, masyarakat, dan negara.



Sumber: Khurshid Ahmad, *Economic Development in Islamic Framework*

Gambar 1.4 Dasar Filosofi Pembangunan Ekonomi Khurshid Ahmad: ⁵⁵

Khurshid Ahmad (1980: 179–180; 1994: 23–25) menguraikan lima ciri esensial dari konsep pembangunan dari sudut pandang Islam berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai inti Islam tersebut: ⁵⁶

- 1) Pertumbuhan ekonomi dalam Islam bersifat menyeluruh, mencakup aspek material, moral, dan spiritual. Aspek-aspek pembangunan baik material, moral, ekonomi, sosial, spiritual, maupun keuangan semuanya saling terkait. Pembangunan merupakan kegiatan yang berfokus pada tujuan dan cita-cita.

⁵⁵ Kurshid, *Economic Development*, 79.

⁵⁶ Kurshid, *Economic Development*, 80.

- 2) Manusia dalam konteks budayanya merupakan fokus utama pertumbuhan. Hal ini berbeda dengan gagasan kontemporer tentang pertumbuhan ekonomi, yang berpendapat bahwa kemajuan hanya mungkin terjadi dalam konteks fisik. Dengan demikian, Islam memperluas konsep kemajuan untuk mencakup manusia selain dunia fisik.
- 3) Karena pertumbuhan ekonomi merupakan upaya yang multifaset, semua upaya harus menjaga keseimbangan antara berbagai elemen untuk mencegah ketidakseimbangan.
- 4) Pembangunan ekonomi melibatkan sejumlah perubahan kuantitatif dan kualitatif yang saling menyeimbangkan satu sama lain.

Agama Islam berpendapat bahwa hal-hal berikut ini seharusnya menjadi fokus utama pembangunan: a) memanfaatkan sumber daya yang telah dianugerahkan Allah kepada umat manusia dan lingkungan hidup secara optimal; dan b) memanfaatkan sumber daya tersebut melalui distribusi yang adil dan peningkatan yang didasarkan pada keadilan dan rasa syukur, sekaligus menentang sikap penindasan dan ketidakbersyukuran.

c. Jaser Auda (Maqasid syariah)

Pemikiran Maqāṣid al-Sharī‘ah menurut Jasser Auda yang dapat Anda gunakan sebagai penguat *middle theory* untuk disertasi mengenai I-HDI.⁵⁷

1) Definisi dan Filosofi "Tingkat Mengapa" (*Levels of Why*)

Jasser Auda mendefinisikan Maqasid al-Syariah sebagai cabang pengetahuan Islam yang menjawab pertanyaan mendasar tentang "mengapa" suatu hukum atau aturan ditetapkan. Dalam konteks I-HDI, Maqasid berfungsi untuk melampaui sekadar kepatuhan formalitas hukum

⁵⁷ Jasser Auda, *Maqasid al-shari‘ah a beginner’s guide*, 2008.14-15

menuju pencapaian tujuan substansial seperti keadilan, kasih sayang, dan kemaslahatan manusia.

2) Transformasi dari "Perlindungan" ke "Pembangunan" (*Development*)

Salah satu kontribusi terpenting Auda yang sangat relevan bagi I-HDI adalah pergeseran paradigma dari sekadar pemeliharaan (*hifdh*) menuju pengembangan (*tanmiyah*) dan hak asasi manusia.⁵⁸

- a) *Hifdh al-Nasl* (Keturunan): Diperluas menjadi kepedulian terhadap keluarga dan pemenuhan hak asasi manusia secara luas.
- b) *Hifdh al-`Aql* (Akal): Tidak hanya melarang alkohol, tetapi didorong menuju pengembangan pola pikir kritis, riset ilmiah, dan penyebaran ilmu pengetahuan.
- c) *Hifdh al-Mal* (Harta): Bergeser dari sekadar perlindungan kepemilikan menjadi tujuan pembangunan ekonomi dan pengurangan kesenjangan sosial.
- d) *Hifdh al-Din* (Agama): Diinterpretasikan ulang sebagai kebebasan beragama dan berkeyakinan.

3) Dimensi dan Hierarki Maqasid Syariah

Auda mengklasifikasikan Maqasid ke dalam tiga dimensi utama yang membantu memetakan indikator pembangunan dalam I-HDI:⁵⁹

- a) Maqasid Umum (*General Maqasid*): Mencakup seluruh syariah, seperti keadilan dan kemudahan.
- b) Maqasid Khusus (*Specific Maqasid*): Berfokus pada bidang tertentu, seperti maqasid dalam hukum keluarga atau transaksi ekonomi.
- c) Maqasid Parsial (*Partial Maqasid*): Tujuan di balik perintah atau larangan spesifik.

⁵⁸ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah: A Beginner's Guide*, ed. oleh Anas S Al Shaikh-Ali Shiraz Khan, 12 ed. (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008).16-17

⁵⁹ Auda, *Maqasid al-shari'ah a beginner's guide*.15

Selain itu, ia tetap merujuk pada hierarki tradisional (*Daruriyyat, Hajiyyat, Tahsiniyyat*) namun memberinya ruh baru yang lebih dinamis sesuai dengan tantangan zaman modern.

4) Pendekatan Sistem (*Systems Approach*)⁶⁰

Auda mengkritik aplikasi hukum Islam yang bersifat reduksionis, literal, dan satu dimensi. beliau menawarkan pendekatan sistem yang bersifat holistik, multidimensi, dan bertujuan (teleologis). Dalam riset I-HDI, pendekatan ini memungkinkan integrasi antara nilai-nilai spiritual dengan indikator pembangunan materiil secara harmonis.

5) Relevansi dengan Pembangunan Manusia (*Human Development*)

Auda secara eksplisit menghubungkan realisasi Maqasid dengan konsep pembangunan manusia yang digunakan dalam laporan pembangunan PBB (UNDP). Baginya, pencapaian Maqasid al-Syariah adalah identik dengan pencapaian target-target pembangunan manusia, sehingga teori ini sangat kuat dijadikan landasan teoretis untuk mengukur kesejahteraan umat Muslim melalui instrumen seperti I-HDI.⁶¹

Pendekatan sistem Jasser Auda memberikan kerangka kerja yang holistik dan dinamis untuk mentransformasikan konsep abstrak Maqasid al-Syariah menjadi indikator terukur dalam *Islamic Human Development Index* (I-HDI). Berdasarkan sumber, berikut adalah cara pendekatan sistem tersebut diaplikasikan:

a) Pergeseran Paradigma: Dari "Perlindungan" ke "Pengembangan"

Auda mengkritik pendekatan tradisional yang hanya berfokus pada pemeliharaan (*hifdh*) yang bersifat pasif dan defensif. Dalam indikator I-HDI, pendekatan sistem Auda menuntut transisi ke arah pengembangan (*tanmiyah*) dan hak asasi manusia.

⁶⁰ Auda, Maqasid al-shari'ah a beginner's guide.16

⁶¹ UI-Haq dan Sen, *Human Development Report*.67-68

(1) Aplikasi pada I-HDI: Indikator tidak lagi hanya mengukur apakah suatu harta "aman" dari pencurian, tetapi apakah ada "pembangunan ekonomi" dan "pengurangan kesenjangan kekayaan".

b) Sifat Multidimensi dan Holistik

Pendekatan sistem menolak cara pandang reduksionis (satu dimensi) dalam melihat hukum Islam. Auda menekankan bahwa Maqasid adalah sebuah sistem yang saling terkait.

(1) Aplikasi pada I-HDI: I-HDI tidak boleh melihat pendidikan (*Aql*), kesehatan (*Soul*), atau ekonomi (*Wealth*) sebagai kolom terpisah. Pendekatan sistem Auda memungkinkan pembuatan bobot indikator yang mengakui bahwa kegagalan di satu dimensi (misal: kesehatan) akan berdampak sistemik pada dimensi lainnya (misal: produktivitas ekonomi).

c) Reinterpretasi Dimensi Klasik ke Indikator Modern

Auda memberikan peta jalan untuk mengubah "lima kebutuhan dasar" (*al-daruriyyat al-khamsah*) menjadi indikator pembangunan manusia modern:

(1) *Hifdh al-`Aql* (Akal): Diaplikasikan dalam I-HDI melalui indikator "penyebaran ilmu pengetahuan," "penelitian ilmiah," dan "pola pikir kritis," bukan sekadar pelarangan alkohol.

(2) *Hifdh al-Nasl* (Keturunan): Diaplikasikan melalui indikator "perawatan keluarga" dan perlindungan "hak asasi manusia," bukan sekadar masalah silsilah atau hukum zina.

(3) *Hifdh al-Din* (Agama): Diaplikasikan sebagai indikator "kebebasan berkeyakinan" dan kemudahan menjalankan ibadah, bukan sekadar pemaksaan kepatuhan formal.

d) Teleologi (Berorientasi pada Tujuan/*Outcome*)

Pendekatan sistem Auda bersifat teleologis, artinya fokus pada hasil akhir (*purposefulness*).

(1) Aplikasi pada I-HDI: Indikator I-HDI yang didasarkan pada Auda akan lebih banyak mengukur "output" dan "impact" (misal: seberapa adil distribusi kekayaan) daripada sekadar "input" (misal: jumlah bank syariah). Validitas indikator ditentukan oleh sejauh mana ia mencapai "tujuan" kemaslahatan..

e) Penyelarasan dengan Standar Internasional (UNDP)

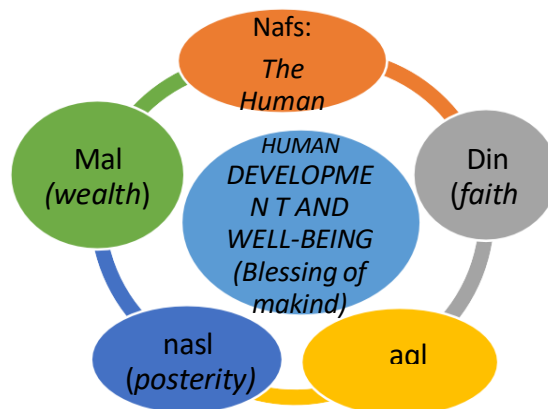
Auda secara eksplisit menyebut bahwa realisasi Maqasid al-Syariah identik dengan target *Human Development Reports* dari PBB.

(1) Aplikasi pada I-HDI: Pendekatan ini melegitimasi penggunaan data sosio-ekonomi standar (seperti literasi, angka harapan hidup, dan paritas daya beli) sebagai bagian sah dari indikator Islami, selama data tersebut diarahkan untuk mencapai kemaslahatan manusia yang menjadi inti Syariah.

d. Imam Al-Syathibi

Maqāsid al-syarī'ah, yang secara harfiah berarti “tujuan penerapan syariat,” merupakan gagasan al-Syatibi yang paling terkenal. Gagasan *maqāsid al-syarī'ah* telah berkembang menjadi landasan penting dalam studi *uṣūl al-fiqh* sejak terbitnya karya penting *al-Muwāfaqāt*, terutama dalam memahami hukum Islam berdasarkan tujuan-tujuan syariat.⁶²

Model pembangunan dalam dimensi maqasid syariah Imam Al-Syathibi yang merupakan tujuan dari ekonomi Syariah. Berikut model



⁶² Al-Syāṭibī, *Al-Mustashfā min 'Ilm al-Uṣūl* (Jil. 1), 4-5.

pembangunan syariah pada konsep maqasid syariah menurut Iman Al-Syathibi:⁶³

Gambar 1.5 Model Pembangunan Maqashid Syariah:
Sumber: Chapra, 2008

Model pembangunan ini merupakan Kesejahteraan manusia merupakan inti dari analisis pembangunan dari sudut pandang Islam, dengan penekanan khusus pada pemeliharaan lima aspek *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu sebagai berikut:⁶⁴

1) Agama (*Hifdzu din*)

Sistem nilai yang mendukung kehidupan dan, pada tahap perkembangan yang lebih tinggi, melahirkan budaya, terbentuk melalui faktor agama atau keyakinan. Sebagai contoh, gaya hidup seseorang dibentuk oleh keyakinannya terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa yang menguasai alam semesta dan menanamkan gagasan bahwa segala sesuatu di bumi serta yang dimiliki manusia sesungguhnya milik Tuhan. Akibatnya, segala aktivitas manusia pada akhirnya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan berada di bawah pengawasan ilahi.⁶⁵

2) Jiwa (*Hifdzu Nafs*)⁶⁶

Manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk menjadi khalifah di bumi, yang tanggung jawab utamanya adalah mengolah dan mengelola bumi dengan tepat. Kualitas orang-orang yang menjalankan kewajiban khalifah ini berdampak langsung pada upaya pengembangan planet ini. Menurut Ibn Khaldun, “kemajuan dan kemunduran suatu peradaban bergantung pada kualitas rakyatnya.” Oleh karena itu, kualitas

⁶³ Al-Syāṭibī, 2:324; lihat juga Abū Bakar al-Mālikī al-'Arabī, n.d., 271.

⁶⁴ Al-Syāṭibī, 2:324; Lihat juga Muhammad Thāhir Ibn 'Āsyūr, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah* (Abu Dhabi: Dār al-Fajr, 1999), 76.

⁶⁵ Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā Al-Syāṭibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah* (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1999).80

⁶⁶ Al-Syāṭibī. 80

manusia memainkan peran krusial dalam pertumbuhan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang memperhitungkan faktor-faktor seperti pendidikan, pelatihan, kesehatan, dan tingkat pendapatan, dapat digunakan untuk mengevaluasi karakteristik ini.

3) Akal (*Hifdzu 'aql*)⁶⁷

Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia adalah dengan melindungi akal. Akal merupakan alat utama untuk menghadapi dan mengatasi berbagai rintangan dalam hidup karena, pada dasarnya, manusia sama sekali tidak memiliki sistem alami yang memadai untuk menopang keberadaannya. Hal ini menegaskan betapa krusialnya ketentuan perlindungan akal dalam Syariah. Dalam konteks ini, melindungi akal berarti secara aktif mengembangkan potensi bawaan akal tersebut sekaligus menghindari situasi yang dapat merusaknya. Pendidikan yang baik dan menyeluruh merupakan salah satu cara utama untuk mengembangkan potensi tersebut.

4) Keturunan (*Hifdzu nasl*)⁶⁸

Makhluk hidup secara alami berkembang biak untuk melahirkan generasi baru yang berfungsi menggantikan generasi sebelumnya atau memperluas populasi guna menjamin kelangsungan garis keturunan mereka. Keturunan-keturunan ini sangat penting bagi kemajuan, terutama dalam hal menjaga pembangunan berkelanjutan.⁶⁹

5) Harta (*hifdzu mal*)

Harta adalah tujuan utama dalam ruang lingkup pembangunan konvensional, Agama Islam juga mengakui hal ini, namun hal itu tidak berarti bahwa memiliki uang adalah hal yang paling penting dan bahwa segala cara untuk mendapatkannya dapat diterima. Dari sudut pandang

⁶⁷ Abu Isyak Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syariah*, Jilid II (Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2009).299

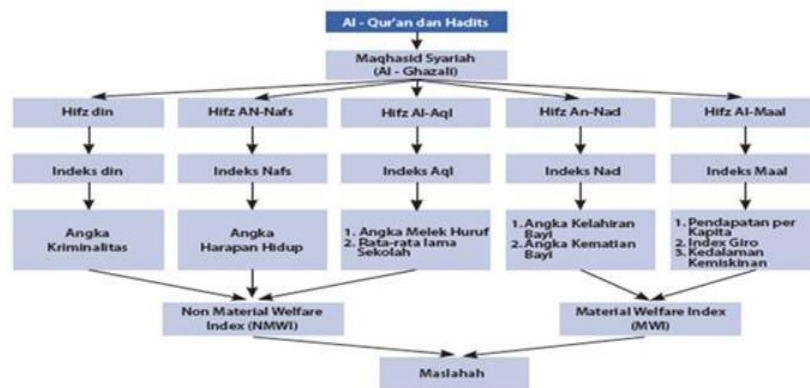
⁶⁸ Al-Syathibi.300

⁶⁹ Wasyith Wasyith, "Beyond Banking: Revitalisasi Maqāsid dalam Perbankan Syariah," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 1 (Mei 2017): 1–25, <https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.1.1823>.

syariat, memperoleh kekayaan sangat dianjurkan, selama hal itu tetap berada dalam batasan dan ketentuan syariat.

e. **Imam al-Ghazali (1058-1111 M)**

Seorang ulama besar dalam tradisi Syafi'i, memberikan kontribusi penting dalam pengembangan konsep maqashid syariah. Dalam karyanya "*Al-Mustasfa*", al-Ghazali mengidentifikasi lima tujuan utama syariah yang kemudian dikenal sebagai *al-kulliyat al-khams* (lima kebutuhan dasar): perlindungan atas harta benda, agama, jiwa, akal, dan leluhur.⁷⁰ Al-Ghazali⁷¹ menekankan bahwa tujuan-tujuan ini bersifat universal dan berlaku untuk semua manusia, terlepas dari latar belakang agama mereka.⁷² Ada dua cara untuk melindungi lima hal yang telah disebutkan sebelumnya:



Gambar 1.6 Kerangka Konsep Pemikiran I-HDI Anto⁷³

Hal ini dicapai dengan melindungi dan memelihara unsur-unsur yang menopang keberadaan dari sudut pandang keberadaan (*min nahiyyati al-wujud*). Izz al-Din ibn Abdi al-Salam (1181-1262 M), seorang ulama

⁷⁰ Abū Hāmid Muḥammad ibn Muḥammad Al-Ghazālī, *Al-Mustashfā min 'Ilm al-Uṣūl*, Jilid 1 (Beirut: Dār al-Fikr, n.d.), 26.

⁷¹ Al-Ghazālī, *Al-Mustashfā*, 26.

⁷² Nurizal Ismail, *Maqashid Syariah Dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: Tazkia Press anggota IKAPI, 2021), 20.

⁷³ Anto, "Introducing an Islamic Human Development Index (I-HDI) to Measure Development in OIC Countries," 2011.88

Syafi'i lainnya, memperluas pemahaman tentang maqashid syariah dalam karyanya "*Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam*". Ia menekankan bahwa semua hukum syariah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan (*maslahat*) dan mencegah kerusakan (*mafsadah*).⁷⁴

Selain itu, Ibn Abd al-Salam menyusun hierarki *maslahah* (kepentingan umum), dengan mengklasifikasikannya ke dalam tiga tingkatan: *tahsiniyyat* (kebutuhan tersier), *hajiyyat* (kebutuhan sekunder), dan *dharuriyyat* (kebutuhan primer).⁷⁵ Pada abad ke-14, Imam al-Shatibi memang mengembangkan teori maqashid syariah secara komprehensif, namun setelahnya, ulama-ulama lain terus mengembangkan dan memperluas konsep ini. Salah satunya adalah Ibn Ashur (1879-1973 M), seorang ulama Tunisia modern yang dianggap sebagai penerus langsung pemikiran al-Shatibi. Dalam karyanya "*Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyyah*",⁷⁶ Ibn Ashur memperluas cakupan maqashid syariah untuk mencakup isu-isu kontemporer seperti kebebasan, kesetaraan, dan hak asasi manusia.⁷⁷

Menurut Al-syathibi Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu terbagi kepada tiga tingkatan yaitu kebutuhan *dharuriyat*, kebutuhan *hajiyyat*, dan kebutuhan *tahsiniyat*. *Dharuriyyat* merupakan seluruh aspek kehidupan yang bersifat fundamental, sehingga wajib ada sebagai syarat mutlak untuk terwujudnya kemaslahatan setiap manusia. Baik sifatnya kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat.⁷⁸

Menurut Abraham Maslow,⁷⁹ apabila ketika seluruh kebutuhan tidak terpenuhi secara sempurna pada waktu bersamaan, pemenuhan yang

⁷⁴ Ibn 'Abd Al-Salām dan 'Izz al-Dīn 'Abd al-'Azīz, *Qawā'id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām*, Jilid 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, n.d.). 299

⁷⁵ Al-Salām dan 'Abd al-'Azīz, *Qawā'id al-Aḥkām*, 300

⁷⁶ Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā Al-Syāṭibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Jilid 4 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1997).300

⁷⁷ Ismail, *Maqashid Syariah Dalam Ekonomi Islam*, 55.

⁷⁸ Ismail, *Maqashid Syariah*, 54.

⁷⁹ Abraham Maslow, "A theory of human motivation," *Psychological Review* 50, no. 3 (1943): 96–360.

paling fundamental merupakan hal prioritas. Sementara dalam konteks kontemporer, pemikiran Al-Syathibi selaras dengan konsep teori kebutuhan dasar Abraham Maslow yaitu dengan teori *hierarchy of needs*, yaitu terdiri dari kebutuhan fisiologi (*physiological needs*) merupakan kebutuhan dasar manusia seperti makan, minum, kebutuhan keamanan (*safety needs*) merupakan kebutuhan perlindungan terhadap rasa gangguan fisik, kesehatan dan status ekonomi, kebutuhan sosial (*social needs*) merupakan kebutuhan untuk saling mencintai, kasih sayang antar sesama, persahabatan, keharmonisan bermasyarakat.⁸⁰ kebutuhan akan penghargaan (*esteem needs*) merupakan kebutuhan terhadap penghormatan dan pengakuan diri sehingga mempengaruhi rasa percaya diri dan prestise seseorang, kebutuhan aktualisasi diri (*self-actualization needs*) merupakan kebutuhan memberdayakan seluruh potensi.⁸¹

Pembangunan dalam pemikiran Islam bermuara pada kata ‘*imârah*’ atau *ta’mîr* sebagai isyarat dalam Al-Quran:

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنَجْعَلُ لَهُمُ آلَهُمْ ذَٰلِكَ أَجْرُكَ الَّذِي اسْتَنْشَأَكَ مِنْ أَرْضٍ وَأَسْتَغْفِرُكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ۝۶۱﴾

Artinya: “Dan Kami mengutus saudara mereka, Saleh, kepada kaum Thamud. “Wahai kaumku, sembahlah Allah; tidak ada tuhan bagi kalian selain Dia,” kata Saleh. Karena Dia telah menjadikan kalian makmur dengan menciptakan kalian dari tanah (debu), mohonlah ampunan-Nya, lalu bertobatlah dari dosa-dosa kalian. Sesungguhnya Tuhan-ku memang menerima (permohonan hamba-hamba-Nya) dan sangat dekat (dengan rahmat-Nya)”. (QS. Hud: 61)⁸²

Kemudian dihubungkan dengan penciptaan manusia di bumi sebagai khalîfah:

⁸⁰ Maslow, *A theory of human*.98

⁸¹ Maslow, *A theory of human*.99

⁸² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponogoro, 2010), QS. Hud: 61.

﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةًۭ ۚ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا
وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَۚ قَالَ اِنِّىْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝۳۰﴾

Artinya: "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui". (QS.Al-Baqarah: 30).⁸³

Kalimat *ista'mara* yang berasal dari kata *'amara* mengandung arti permintaan atau Perintah Allah yang tak tergoyahkan agar umat manusia memanfaatkan inisiatif pembangunan untuk mewujudkan kemakmuran di bumi.⁸⁴ Hal ini menunjukkan bahwa usaha pembangunan di mana ekonomi salah satu dimensinya adalah misi utama penciptaan manusia di muka bumi.

Berlandaskan pada beberapa definisi pembangunan ekonomi perspektif Islam. Dengan demikian, tujuan analisis ekonomi pembangunan adalah untuk mengkaji berbagai permasalahan yang dihadapi negara dan menerapkan solusi-solusi praktis. Di Negara Indonesia konsep pembangunan ekonomi Islam masih belum mampu memberikan alternatif secara nyata dan kongkrit. Hal ini disebabkan dengan melekatnya sistem perkonomian kapitalis. Kesejahteraan, pertumbuhan, dan perkembangan perekonomian adalah tujuan pembangunan yang dilaksanakan oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang tersebut pada saat ini mengalami banyak kegagalan. kegagalan ini diakibatkan oleh pembangunan yang dilaksanakan banyak mengadopsi paham kapitalisme.⁸⁵

⁸³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, QS.Al-Baqarah: 30, .

⁸⁴ Saefullah, *Ekonomi Pembangunan Islam*, n.d, 44.

⁸⁵ M Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 6.

Berdasarkan pada persoalan dasar pembangunan ekonomi Islam yang terjadi di Indonesia saat ini, dibutuhkan cara baru yang lebih nyata untuk mengatasi hal demikian. Khursid Ahmad⁸⁶ menegaskan dalam bukunya bahwa terdapat Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Faktor-faktor tersebut meliputi: (1) sumber daya yang dapat diinvestasikan (*investible resources*); (2) kewirausahaan (*entrepreneurship*) dan sumber daya manusia (*human resources*); serta (3) teknologi (*technology*).⁸⁷

Dalam ekonomi pembangunan syariah terdapat model teori pembangunan yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun yaitu sebagai berikut: Berkat kontribusinya yang sangat besar terhadap landasan bidang ini, Ibn Khaldun sering disebut sebagai bapak ekonomi syariah. Dari sudut pandang akademis, ia menunjukkan kedalaman intelektual di berbagai bidang lain, bukan sekadar menguasai satu bidang saja. Luasnya wawasan inilah yang justru membuat teorinya begitu menyeluruh dan global, terutama yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi syariah.⁸⁸

f. Ibnu Khaldun (Pembangunan ekonomi)

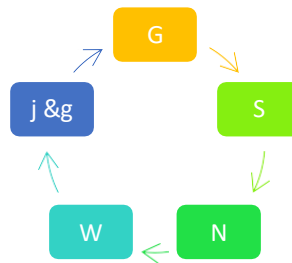
Dinamika pembangunan, ekonomi, dan peradaban yang semuanya rentan terhadap siklus naik turun dijelaskan oleh model pembangunan Ibn Khaldun. Selain itu, pendekatan ini bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah penting yang berkaitan dengan berbagai proses sosial. Secara umum, konsep-konsep ini dirangkum dalam gagasan “delapan prinsip bijak,” atau Hikammiyah.⁸⁹ Model berikut ini dapat digunakan untuk menggambarkan prinsip-prinsip Hikammiyah tersebut:

⁸⁶ Kurshid, “Economic Development in an Islamic Framework.”, 179-180.

⁸⁷ M Umer Chapra et al., *Etika Ekonomi Politik: Elemen-elemen Strategis Pembangunan Masyarakat Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 2010), 12.

⁸⁸ Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, terj. Ahmadie Thaha (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001).

⁸⁹ Ibnu Khaldun, *The Muqaddimah: An Introduction to History*, terj. Franz Rosenthal (Princeton: Princeton University Press, 1958), 366.



Gambar 1.7 Model Pembangunan Ibnu Khaldun:⁹⁰

Paradigma pembangunan Ibn Khaldun dapat dinyatakan secara matematis sebagai berikut: ⁹¹

$G = f(S, N, W, j \text{ dan } g)$

G: Negara (*The state*)

S: Institusi (*Institutions*)

N: sumber daya manusia (*Human Beings*)

W: Kekayaan (*Wealth*)

j: Keadilan (*justice*)

g: Pembangunan (*development*)

Karena semua variabel saling terkait, analisis pembangunan berdasarkan model ini dapat dimulai dari salah satu aspek tersebut. Selain itu, model Ibn Khaldun menggabungkan unsur-unsur dari sejumlah bidang akademis, termasuk etika, psikologi, politik, sosiologi, ekonomi, dan demografi, yang semuanya saling berinteraksi dan memengaruhi bagaimana suatu peradaban berkembang dan mengalami kemunduran.

1) Faktor-Faktor Perkembangan Berdasarkan Model Ibn Khaldun

Penjelasan terperinci mengenai dampak suatu faktor tertentu dan bagaimana faktor tersebut berinteraksi dengan faktor-faktor lain akan diuraikan di bawah ini:

a) Negara (*The State*)

⁹⁰ Ibnu Khaldun, *The Muqaddimah*, 367.

⁹¹ M Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective* (Leicester: The Islamic Foundation, 2000), 147-148.

Menurut Ibn Khaldun, seorang penguasa harus memiliki sifat-sifat terpuji yang dibutuhkan baik dalam bidang politik maupun agama. Seorang pemimpin harus menghindari kelicikan, ketidakjujuran, dan penipuan, sekaligus bersikap toleran, bijaksana, dan adil. Selain itu, pemimpin harus menepati janji, perjanjian, dan kontrak; mudah dijangkau oleh rakyat; mendengarkan keluhan mereka; menangani masalah-masalah mereka; serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama kaum kurang mampu.

Menurut Umer Chapra (2001), kekuasaan negara dapat dibagi menjadi tiga kategori. Pertama, ada kekuasaan alamiah atau normal (*tabi'ī*), yang biasanya disebut sebagai *laissez-faire*, yang memungkinkan orang untuk mengikuti dorongan dasar mereka dan mengejar kepentingan mereka. Kedua, kekuasaan politik rasional (*siyāsah 'aqliyyah*), yang memungkinkan individu mengejar tujuan pribadi dan duniawi sambil menghindari perbuatan salah melalui prinsip-prinsip yang masuk akal; jenis kekuasaan ini dapat dikaitkan dengan gagasan negara kesejahteraan sekuler. Ketiga, kekuasaan yang berlandaskan etika (*siyāsah dīniyyah* atau *khilāfah*), yang didasarkan pada prinsip-prinsip Syariah dan bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia di dunia maupun di akhirat; gagasan ini disebut negara kesejahteraan Islam atau khilāfah.⁹²

b) Institusi (*Institutions*)

Sifat-sifat luhur seperti ketaatan, kejujuran, integritas, kesederhanaan, dan persatuan ditanamkan dalam masyarakat melalui lembaga-lembaga atau Syariah. Selain mendorong keadilan, saling pengertian, kerja sama, perdamaian, dan

⁹² M Umer Chapra, *Visi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Menurut Maqasid Asy-Syariah* (Solo: PT. Aqwam Media Profetika, 2017), 52.

kerukunan sosial, prinsip-prinsip ini dapat mendukung proses pertumbuhan. Syariah juga berperan dalam mencegah tindakan-tindakan yang dapat merugikan masyarakat. Syariah mendorong pemanfaatan sumber daya secara proporsional dengan mengatur penggunaannya, yang menjamin pendekatan yang seimbang dalam pengelolaannya.⁹³

c) Sumber daya insani (*Human Beings*)

Kekayaan atau kesulitan yang dialami masyarakat suatu peradaban memainkan peran penting dalam kemunculan dan kemundurannya. Oleh karena itu, Ibn Khaldun sangat menekankan aspek manusia dalam penelitiannya. Dalam hal ini, keberhasilan dan kesulitan sosial dipengaruhi oleh berbagai faktor lain yang bekerja dalam jangka waktu yang panjang melalui proses sebab-akibat, di samping variabel-variabel ekonomi.⁹⁴

d) Kekayaan (*Wealth*)

Menurut Ibn Khaldun, investasi sangat penting untuk mendorong penciptaan kekayaan. “Dan ketahuilah bahwa kekayaan tidak akan bertambah jika hanya ditimbun dan disimpan; sebaliknya, kekayaan akan bertambah dan berkembang jika dibelanjakan demi kebaikan umum, didistribusikan kepada mereka yang berhak menerimanya, dan digunakan untuk meringankan penderitaan,” katanya. Tarif pajak yang rendah, jaminan keamanan harta benda dan jiwa, serta pengembangan lingkungan fisik yang sehat, semuanya berperan sebagai pendorong bagi akumulasi kekayaan semacam ini.⁹⁵

Pertumbuhan ekonomi berbasis syariah menjadi contoh bagaimana sistem ekonomi Islam mengarahkan masyarakat

⁹³ Todaro dan Smith, *Economic Development*..35-35

⁹⁴ Todaro dan Smith, *Economic Development*..35

⁹⁵ Todaro dan Smith, *Economic Development*..37

menuju kerangka kerja yang berfokus pada *Falah*, atau kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Gagasan inti dari sistem-sistem ini membedakannya dari paradigma ekonomi kapitalis. Lebih tepatnya, gagasan-gagasan berikut ini membentuk landasan sistem kapitalis: 1. Kepemilikan harta pribadi, 2. Persaingan bebas dan kebebasan ekonomi; serta 3. Ketimpangan ekonomi. Di sisi lain, sistem sosialis berpegang pada prinsip-prinsip berikut:⁹⁶ 1) Kepemilikan harta oleh negara, 2) Disiplin politik, dan 3) Kesenjangan ekonomi.⁹⁷

g. Umer Chapra

Menurut Chapra (1995), Islam memiliki sistem ekonomi yang pada dasarnya berbeda dari sistem-sistem ekonomi dominan lainnya. Landasan dan prasyarat sistem ekonomi Islam memberikan visi, tujuan, dan strategi yang berbeda dari sistem-sistem ekonomi sekuler yang berlaku saat ini. Tujuan utamanya didasarkan pada gagasan Islam tentang kehidupan yang layak (*hayatan thayyibah*) dan kesejahteraan manusia (*falah*), bukan semata-mata pada aspek material. Kedua gagasan tersebut sangat menekankan pada pemenuhan kebutuhan spiritual manusia, keadilan sosial dan ekonomi, serta persaudaraan (*ukhuwah*). Menurut Rahman (1995), prinsip-prinsip inti dari sistem ekonomi Islam adalah sebagai berikut:⁹⁸

1) Kebebasan Individu.

Setiap orang berhak atas kemandiriannya sendiri. Di negara Islam, mereka memiliki kebebasan untuk menyuarakan pemikiran dan mengambil keputusan yang dianggap penting; tanpa kebebasan ini, seorang Muslim tidak dapat menjalankan kewajiban-kewajiban esensial dan mendasar yang diperlukan untuk menjamin kesejahteraan dan mencegah gejolak sosial.

⁹⁶ Todaro dan Smith, *Economic Development*..38

⁹⁷ Chapra, *Visi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Menurut Maqasid Asy-Syariah*, 53.

⁹⁸ Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, 147-148.

2) Hak Terhadap Harta.

Islam mengakui hak setiap orang untuk memiliki harta benda. Namun, untuk memastikan bahwa kebebasan ini tidak merugikan kepentingan masyarakat luas, Islam menetapkan beberapa batasan.

3) ketimpangan ekonomi dalam batas-batas yang wajar. Islam mengakui adanya ketimpangan ekonomi di antara manusia, namun tidak membiarkannya berkembang tanpa kendali; sebaliknya, Islam bertujuan untuk menjaga perbedaan-perbedaan tersebut dalam batas-batas yang adil, layak, dan tidak berlebihan.

4) Kesamaan Sosial.

Islam mendukung dan mendorong kesetaraan sosial sedemikian rupa sehingga kekayaan negara tidak dinikmati secara eksklusif oleh sekelompok orang tertentu, namun Islam tidak mengutamakan kesetaraan ekonomi. Selain itu, sangatlah penting agar seluruh warga negara dalam suatu negara Islam memiliki akses yang setara terhadap lapangan kerja dan bentuk-bentuk kegiatan ekonomi lainnya.⁹⁹

5) Jaminan Sosial.

Setiap orang berhak tinggal di negara Islam, dan setiap warga negara dijamin bahwa kebutuhan dasarnya akan terpenuhi. Bahkan, kewajiban utama negara Islam adalah menjamin bahwa setiap warga negaranya memiliki akses terhadap kebutuhan pokok sesuai dengan “hak untuk hidup.” Selain itu, setelah kebutuhan dasar warga negara terpenuhi, tercipta kesetaraan penuh di antara mereka.¹⁰⁰

6) Distribusi Kekayaan Secara Meluas.

Islam mencegah penumpukan kekayaan pada kelompok kecil tertentu orang dan menganjurkan distribusi kekayaan kepada semua lapisan masyarakat. larangan penumpukan kekayaan. Sistem ekonomi

⁹⁹ Chapra, *Visi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Menurut Maqasid Asy-Syariah*, 53.

¹⁰⁰ Chapra, *Visi Islam*, 54.

Islam melarang orang menumpuk kekayaan secara berlebihan dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mencegah negara terlibat dalam praktik-praktik buruk semacam itu.

- 7) Perilaku antisosial dilarang. Semua kebiasaan sosial yang merugikan dan antisosial, termasuk perjudian, minum minuman beralkohol, riba, menimbun uang, dan terlibat dalam transaksi pasar gelap, dilarang dalam sistem ekonomi Islam.¹⁰¹
- 8) Kesejahteraan Masyarakat Dan Individu.¹⁰²

Islam mengakui bahwa kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan individu bersifat saling melengkapi, bukan saling bertentangan. Untuk mendorong tercapainya manfaat bersama, sistem ekonomi Islam bertujuan untuk mengurangi konflik tersebut.

Sebagaimana dijelaskan di dalam surah al-Hasyr: 7 dalam ayat al-Qur'an yang berbunyi:

﴿مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۖ﴾

Artinya: “Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.” (QS.Al-Hashr: 7).¹⁰³

Islam menganjurkan suatu sistem yang sangat sederhana untuk peningkatan ekonomi masyarakat yang membolehkan anggotanya

¹⁰¹ Chapra, *Visi Islam*, 55.

¹⁰² Chapra, *Visi Islam*, 52.

¹⁰³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, QS.Al-Hashr: 7.

melakukan proses pembangunan ekonomi yang stabil dan seimbang, bebas dari kelemahan sistem kapitalis dan sosialis. begitupun juga di dalam QS. Al-A'raf : 96:

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٩٦﴾

Artinya: “Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.”¹⁰⁴

Pembangunan ekonomi secara umum terdapat tiga elemen penting yang berkaitan dengan, yaitu:¹⁰⁵ Distribusi pendapatan di antara individu dan keluarga harus tercermin dalam pengukuran pendapatan nasional, selain aktivitas ekonomi berbasis pasar. Komposisi dan distribusi riil produksi per kapita tidak sepenuhnya tercermin dalam Produk Nasional Bruto (PNB), meskipun PNB merupakan indikator yang berguna untuk mengukur kinerja ekonomi. Oleh karena itu, produksi dari sektor pedesaan harus dimasukkan dalam perhitungan pendapatan nasional, dan tingkat kesejahteraan ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip Syariah juga harus diperhitungkan.

h. Perbedaan Fundamental I-HDI dan HDI"

Untuk mempertegas posisi I-HDI dalam penelitian ini, penting dipahami perbedaan mendasar antara HDI dan I-HDI sebagai berikut:

¹⁰⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, QS.Al-A'raf: 96

¹⁰⁵ Todaro dan Smith, *Economic Development*..40

Tabel 1.4 Perbedaan HDI dan I-HDI

Aspek	HDI (Konvensional)	I-HDI (Syariah)
Dimensi	3 dimensi: kesehatan, pendidikan, standar hidup	5 dimensi: agama, jiwa, akal, keturunan, harta
Landasan Teori	<i>Human Development</i> (UNDP)	Maqashid Syariah (Al-Ghazali & Al-Syathibi)
Fokus	Material (duniawi)	Holistik (<i>falah</i> : dunia & akhirat)
Indikator	UHH, RLS/HLS, Pengeluaran per kapita	Faith Index, Life Index, Science Index, Family Social Index, Property Index
Kelebihan	Standar internasional, mudah dibandingkan	Kompatibel dengan nilai Islam, mengukur spiritual
Kelemahan	Mengabaikan aspek spiritual & moral	Data terbatas, belum menjadi standar global

Dengan memahami perbedaan ini, penelitian ini menegaskan bahwa I-HDI bukan sekadar 'HDI versi Islam', melainkan indeks yang lebih komprehensif karena mencakup dimensi yang selama ini terabaikan oleh indikator konvensional, yaitu dimensi agama dan keluarga, serta mengukur keseimbangan antara pencapaian material dan spiritual dalam kerangka maqashid syariah.

i. Konsep I-HDI

1) *Islamic-Human Development Index (I-HDI)* Anto

Pengertian I-HDI

Salah satu instrumen untuk menilai pembangunan manusia dari sudut pandang Islam adalah I-HDI. Untuk memungkinkan manusia

menjalani kehidupan yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat, instrumen ini mengukur kesejahteraan manusia berdasarkan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan mendasar (*masalahah*).¹⁰⁶

2) Konsep *Islamic-Human Development Index* (I-HDI)

I-HDI awalnya diusulkan oleh Muhammad Boedi Hendrie Anto, yang memaparkannya pada Konferensi Internasional Keuangan dan Ekonomi Islam Langkawi (*Langkawi Islamic Finance and Economics International Conferen-LIFE 1*) pada tahun 2009.¹⁰⁷ Studi Anto mencakup skor I-HDI untuk negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam yang dihitung menggunakan lima komponen berbasis syariah.¹⁰⁸

Dari banyaknya metode yang diciptakan hanya sedikit metode yang mengukur kesejahteraan berdasarkan pandangan ekonomi Islam, hanya metode yang dikenalkan oleh Anto, Buku ini menjelaskan dasar-dasar I-HDI, sebuah indikator pertumbuhan manusia yang didasarkan pada *Maqasid Syariah*, dan secara khusus menerapkannya dengan menggunakan pendekatan yang matematis.

Metode tersebut diperkenalkan dalam penelitian berjudul “*Introducing an Islamic-Human Development Index to Measure Development in OIC Countries*” tersebut menunjukkan bahwa I-HDI mempertimbangkan dimensi Maqashid Syariah dalam mengukur bagaimana performa atau tingkat ekonomi di suatu negara berkembang dengan mempertimbangkan bahwa mayoritas penduduknya beragama Islam, menurutnya indikator *Islamic Human Development Index* (I-HDI) yang dirujuk dari dimensi maqashid syariah Al-Ghazali dan Asy-Syatibi akan menciptakan pengukuran yang lebih komprehensif dan akurat. Pada penelitiannya, komponen

¹⁰⁶ Anto, “Introducing an Islamic Human Development Index (I-HDI) to Measure Development in OIC Countries,” 2011., 80.

¹⁰⁷ Anto, *Introducing an Islamic*.81

¹⁰⁸ Anto, *Introducing an Islamic*.81

perhitungan I-HDI tersebut terdiri dari lima dimensi *maqashid syariah* diantaranya penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Anto (2009) mengukur kemajuan dari perspektif Islam dengan menggunakan sejumlah komponen indeks. Indeks Keimanan, Indeks Kehidupan, Indeks Ilmu Pengetahuan, Indeks Keluarga-Sosial, dan Indeks Kekayaan merupakan unsur-unsur yang membentuk indeks tersebut. Jumlah masjid, ketaatan dalam berpuasa, *zakat* (sedekah), sumbangan amal, serta tingkat kejahatan, korupsi, dan kekerasan semuanya berkontribusi terhadap Indeks Keimanan, yang mengukur aspek pelestarian agama. Indeks Kehidupan menggunakan metrik seperti harapan hidup rata-rata, penggunaan narkoba, dan prevalensi merokok untuk mencerminkan pelestarian kehidupan. Selain itu, tingkat pendidikan, jumlah lembaga pendidikan, perkiraan tahun masa sekolah, rata-rata tahun masa sekolah, serta jumlah hak kekayaan intelektual merupakan indikator pelestarian kecerdasan, yang diwakili oleh Indeks Ilmu Pengetahuan. Dengan menggunakan metrik seperti jumlah keluarga, tingkat kelahiran, tingkat perceraian, dan tingkat kematian, Indeks Keluarga-Sosial menggambarkan pelestarian keturunan. Terakhir, Indeks Kekayaan, yang didasarkan pada PDB per kapita, pertumbuhan ekonomi, PDB per pertumbuhan populasi, rasio Gini, dan tingkat kemiskinan, mengukur pelestarian kekayaan.¹⁰⁹

Maqashid syariah merupakan salah satu gagasan utama dalam studi hukum Islam. Para ulama hukum Islam terdorong oleh pentingnya *maqashid syariah* sehingga memasukkannya sebagai syarat bagi para *mujtahid* yang melakukan *ijtihad*. Sementara itu, mencapai kebaikan dan menghindari kejahatan (*jalbul mashalih wa dar'u al-mafasid*) merupakan inti dari gagasan *maqashid syariah* itu

¹⁰⁹ M B Hendrie Anto, "Introducing an Islamic Human Development Index (I-HDI) to Measure Development in OIC Countries," *Islamic Economic Studies* 19, no. 2 (2010): 69–95.

sendiri, yang melengkapi tujuan utama syariah Islam yang diturunkan ke muka bumi.

Banyak ulama Islam, seperti Al-Ghazali (1937), Al-Habsi dan Hassan (1996), Ibnu Ashur (2001), Asy-Syatibi (2004), Dusuki dan Abozaid (2007), Chapra (2008), dan Choudhury (2014), telah menyempurnakan gagasan *maqāṣid al-syarī'ah*. Di antara para pemikir ini, akademisi tradisional seperti Al-Ghazali dan Asy-Syatibi mengembangkan *al-kulliyāt al-khamsah*, yaitu lima tujuan utama untuk melestarikan kehidupan. Kelima tujuan tersebut adalah menjaga agama (*ḥifḍ ad-dīn*), jiwa (*Hifdz an-Nafs*), akal (*Hifdz al-'Aql*), keturunan (*Hifdz an-Nasl*), dan harta (*ḥifḍ al-māl*).¹¹⁰

Selanjutnya dari konsep maqashid syariah yang telah ada tersebut telah banyak pula peneliti empiris yang kemudian mengembangkan dan memperbaharainya menjadi sebuah metode pengukuran pencapaian tingkat kesejahteraan seperti *Islamic-Human Development Index* (I-HDI) oleh Anto (2009), *An Economic Islamicity Index* oleh Rehmen & Askari (2010), *Maqashid Al-Shari'ah Index* oleh Amir-ud-Din (2014), *The Degree of Economic Islamicity* oleh Rama (2016), dan Indeks Pembangunan yang Didasarkan pada Maqasid al-Syari'ah.¹¹¹

Rehmen & Askari pada tahun 2010 dalam penelitiannya mengenai *An Economic Islamicity Index* memberikan peringkat derajat keIslaman ekonomi negara-negara Muslim yang didasarkan pada 12 prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam. Pada penelitiannya menuai kontroversi pada aspek metodologi dan temuan yang dihasilkan. Indikator yang digunakan untuk mengukur derajat keIslaman lebih bersifat indikator-indikator ekonomi dibandingkan dengan keIslaman itu sendiri. Kinerja indikator tersebut lebih banyak

¹¹⁰ Rama dan Yusuf, "Construction of islamic human development index." 67

¹¹¹ Chapra, *Visi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Menurut Maqasid Asy-Syariah*, 50.

dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah masing-masing dan tidak ada kaitannya dengan ‘derajat keIslaman’ itu sendiri.¹¹²

Kemudian pada penelitian Rama pada tahun 2016 melakukan pengukuran tingkat keislaman ekonomi provinsi di Indonesia yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam dalam bidang ekonomi dengan menerapkan model Rehman & Askari (2010). Metode yang digunakan menggunakan pembobotan dalam konstruksi indeks nya dan menghasilkan hasil yang bias dan subjektif. Kemudian penelitian tersebut menggunakan periode waktu hanya satu periode saja yaitu tahun 2014 sehingga memungkinkan terjadinya perbedaan peringkat akibat perubahan periode. Selain itu pada penelitian ini juga masih membutuhkan studi empiris yang dapat memperkuat klaim bahwa prinsip-prinsip Islam dapat mendorong kinerja ekonomi suatu negara (menjawab tantangan banyak kalangan yang menyalahkan Islam atas keterbelakangan ekonomi sebagian besar negara-negara Muslim).¹¹³

Selanjutnya, dengan mempertimbangkan setiap Amir-ud-Din (2014) mengembangkan pendekatan pengukuran pembangunan yang lebih komprehensif. *Indeks Maqāṣid al-Syarī'ah* (MSI) merupakan hasil dari penilaian ini, yang dirancang untuk digunakan oleh negara-negara anggota OKI. Sementara itu, Hasan dkk. (2018) mengukur pembangunan dengan menggunakan MSI sebagai landasan. Dalam menggambarkan kemajuan sosial-ekonomi Pakistan, MSI menunjukkan kinerja yang lebih baik daripada indeks OPHI dan UNDP. Oleh karena itu, dari sudut pandang Islam, *Maqāṣid al-Syarī'ah Index* (MSI) dapat dipandang sebagai kerangka kerja yang luas untuk menilai kemajuan.¹¹⁴ Mengingat faktor-faktor tersebut, teknik pengukuran Indeks Pembangunan Manusia Islam (I-HDI) yang

¹¹² Rama dan Yusuf, “Contruction of islamic human development index.”66

¹¹³ Rama dan Yusuf, *Contruction of islamic*.67

¹¹⁴ Chapra, *Visi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Menurut Maqasid Asy-Syariah*, 56.

digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada pengukuran kemajuan I-HDI yang diusulkan oleh Rafsanjani (2014) dan Suharno (2019). Kelima dimensi *maqāṣid al-syarī'ah* berfungsi sebagai landasan pengukuran dalam kedua penelitian tersebut; tidak ada proksi tambahan yang digunakan.

Dengan mengevaluasi faktor-faktor material maupun non-material, I-HDI memberikan cara untuk menilai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pada segi materi ditujukan dalam rangka memperoleh kesejahteraan yang holistik dan menyeluruh di dunia (kesejahteraan sementara), sedangkan segi moral adalah untuk memperoleh kesejahteraan holistik di akhirat (kesejahteraan permanen). Dengan kata lain, untuk meraih kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia maupun di akhirat suatu keadaan yang dikenal sebagai *falah* diperlukan pemenuhan lima tuntutan mendasar yang terwakili dalam lima aspek *Maqasid Syariah* ini.¹¹⁵

Dalam hal ini Islam telah mengatur tentang pengembangan kesejahteraan manusia bahwasanya kesejahteraan di dunia sifatnya sementara dibandingkan dengan kesejahteraan akhirat, seperti yang tercantum dalam Q.S al-A'la (87) ayat 16-17:

﴿بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۖ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ۖ﴾¹¹⁶

Artinya: “Sedang kamu (orang-orang kafir) memilih kehidupan duniawi. Padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal.” (QS. Al-A'la: 16-17).¹¹⁶

Meskipun demikian, manusia tidak berarti hanya diperkenankan untuk beribadah secara murni saja dan melupakan dunianya. Manusia juga tentunya diarahkan sekuat tenaga dan

¹¹⁵Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah: A Beginner's Guide*, ed. oleh Anas S Al Shaikh-Ali Shiraz Khan, 12 ed. (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008).18-19

¹¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Q.S al-A'la (87) ayat 16-17.

pikirannya untuk memperoleh harta sehingga dapat mencari pahala akhirat dengan harta yang dianugerahkan Allah kepada manusia tersebut sebagaimana disebutkan dalam ayat 77 Surah al-Qasas (28):

﴿وَأَتَّبِعْ فِي مَآءَاتِكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ
كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾¹¹⁷

Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (QS. Al-Qasas: 77).”¹¹⁷

3) Komponen Penyusun *Islamic-Human Development Index* (I-HDI)

Penilaian Indeks Pembangunan Manusia Islam (I-HDI) didasarkan pada lima dimensi *Maqasid Syariah*, yang dikembangkan oleh M.B. Anto dan mengacu pada pemikiran Al-Ghazali dan Al-Shatibi. Kelima dimensi tersebut diantaranya sebagai berikut:¹¹⁸



Gambar 8.3. Kerangka dan Konsep *Islamic Human Development Index* (I-HDI)

Gambar 1.8 Kerangka dan Konsep *Islamic Human Development Index* (I-HDH)

¹¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Q.S. al-Qasas (28) ayat 77.

¹¹⁸ Abu Isyak Al-Syathibi, *Al-Muwaqqat Fi Ushul Al-Syariah*, Jilid II (Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2009), 109.

Selanjutnya, dari sudut pandang Islam, kesejahteraan ditentukan oleh lima aspek ini dibagi menjadi dua aspek utama yaitu *Material Welfare* dan *Non-Material Welfare* yang dirumuskan dengan formula seperti dibawah ini (Anto, 2009):¹¹⁹

$$\begin{aligned} WH &: f(MW \& NW) \\ MW &: f(PO \& DE) \\ NW &: f(IEV) \\ IEV &: f(LE, E, FSR, \& R) \end{aligned}$$

di mana:

$$\begin{aligned} WH &: \text{Welfare Holistic} \\ MW &: \text{Material Welfare} \\ NW &: \text{Non-Material Welfare} \\ PO &: \text{Property Ownership} \\ DE &: \text{Distributional Equity} \\ IEV &: \text{Islamic Environment and Values} \\ LE &: \text{Life Expectancy} \\ E &: \text{Education} \\ FSR &: \text{Family and Social Relationship} \\ R &: \text{Religiosity} \end{aligned}$$

Berdasarkan rumus tersebut, *holistic welfare* (HW) dalam perspektif Islam mencakup dua dimensi utama, yaitu *material welfare* (MW) dan *non-material welfare* (NW). *Material welfare* direpresentasikan oleh *property ownership* (PO) dan *distributional equity* (DE). Sementara itu, *non-material welfare* direpresentasikan oleh *Islamic environment and values* (IEV), yang mencakup *life expectancy* (LE), *education* (E), *family and social relationship* (FSR), serta *religiosity* (R).¹²⁰

I-HDI kemudian diukur menggunakan indeks yang dapat diukur secara kuantitatif, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.1.¹²¹

Tabel 1.5 Indeks Terukur untuk Mengukur I-HDI

Tujuan Pembangunan	Dimensi	Index dimensi
Masalah	<i>Hifdzu ad-Dien</i>	<i>Faith index</i>
	<i>Hifdzu an-Nafs</i>	<i>Life index</i>
	<i>Hifdzu al-'Aql</i>	<i>Science index</i>

¹¹⁹ M B Hendrie Anto, "Introduction An Islamic Human Development Index (I-HDI), 88 Measure Development In OIC Countries," *Jurnal Islamic Economic Studies* 19, no. 2 (2009).

¹²⁰ Anto, "Introducing an Islamic Human Development Index (I-HDI) to Measure Development in OIC Countries," 2011., 89

¹²¹ Anto, *Introducing an Islamic*, 89.

	<i>Hifdzu an-Nasl Hifdzu al-Māl</i>	<i>Family social index Property index</i>
--	-------------------------------------	---

Sumber: Anto (2009)

Adapun indikator I-HDI yang diusulkan pada penelitian ini merujuk pada indikator I-HDI seperti dalam penelitian Anto (2009) yang disesuaikan dalam penelitian Rafsanjani (2014) sebagaimana

Tabel 1.6 Indeks I-HDI Anto¹²²

Kesejahteraan	Dimensi	Indeks dimensi	Indikator
Kesejahteraan <i>Material Index</i> (WMI)	<i>Hifz Māl</i> (<i>property index</i>)	<i>Index Māl</i>	1. Pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan (Rupiah berdasarkan PPP). 2. Rasio Gini 3. Indeks tingkat kemiskinan (P2) dan indikator kesenjangan kemiskinan (P1)
Kesejahteraan <i>Non-Material Index</i> (WNMI)	<i>Hifz Nasl</i> (<i>familiy social index</i>)	<i>Indeks Nasl</i>	1. Angka kesuburan secara keseluruhan 2. Angka kematian bayi 3. Jumlah keluarga
	<i>Hifz din</i> (<i>faith index</i>)	<i>Indeks din</i>	1. Tingkat kejahatan 2. Jumlah masjid 3. Zakat
	<i>Hifz 'aql</i> (<i>Science index</i>)	<i>Indeks 'aql</i>	1. Perkiraan Lama Pendidikan 2. Rata-rata Lama Pendidikan 3. Jumlah lembaga pendidikan
	<i>Hifz Nafs</i> (<i>life index</i>)	<i>Indeks Nafs</i>	1. Harapan hidup 2. Pengguna narkoba 3. Perokok

Sumber: Anto (2009)

¹²² Anto, Introducing an Islamic, 88.

Sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 2.3, indikator HDI dari UNDP menjadi dasar untuk kategori I-HDI.¹²³

Tabel 1.7 Kategori I-HDI pada Ukuran HDI

Status Pembangunan	Kriteria
Nilai I-HDI $\geq 80,00$	Sangat Tinggi
$70,00 \leq \text{nilai I-HDI} \leq 79,99$	Tinggi
$60,00 \leq \text{nilai I-HDI} \leq 69,99$	Sedang
$0 \leq \text{nilai I-HDI} \leq 59,99$	Rendah

Sumber: UNDP yang disesuaikan

4) Pertumbuhan Ekonomi Syariah (*Applied Theory*)

Pembangunan ekonomi merupakan masalah jangka panjang dan telah menjadi fenomena penting di dunia belakangan ini. Proses pertumbuhan ekonomi tersebut disebut sebagai *Modern Economic Growth*. Pada dasarnya, praktik peningkatan produksi per kapita dalam jangka waktu yang panjang dikenal sebagai pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, peningkatan output per kapita yang memberikan pilihan yang lebih beragam dalam konsumsi barang dan jasa serta disertai dengan peningkatan daya beli masyarakat merupakan indikator kemakmuran dalam jangka panjang.¹²⁴

Definisi pertumbuhan ekonomi lainnya adalah sebagai suatu proses peningkatan output dari waktu ke waktu, yang merupakan indikator penting untuk menilai keberhasilan pertumbuhan suatu negara.¹²⁵ Kuznets mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai peningkatan kemampuan jangka panjang suatu negara dalam menyediakan berbagai jenis komoditas ekonomi bagi warganya.

¹²³ UNDP, *Human Development Report* (New York: United Nations Development Programme, 1997), 98.

¹²⁴ Romer, Paul M. (1986). "Increasing returns and long-run growth," *Journal of Political Economy* 94: 1002–1037.

¹²⁵ T Romer, Paul M. (1986). "Increasing returns and long-run growth," *Journal of Political Economy* 94: 1002–1037. odaro dan Smith, *Economic Development*..40

Dari sudut pandang ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto per kapita dapat digunakan untuk menilai pertumbuhan ekonomi.¹²⁶ Nilai total dari seluruh produk jadi dan jasa termasuk seluruh nilai tambah yang dihasilkan oleh suatu wilayah selama satu tahun, dibagi dengan jumlah penduduk keseluruhan, dikenal sebagai produk domestik regional bruto, atau PDRB per kapita yang tinggal di daerah tersebut (Badan Pusat Statistik). Bagi daerah, indikator ini adalah komponen penting dan berguna untuk kemampuan daerah tersebut di masa yang akan datang dan menjadi acuan pemerintah untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan.¹²⁷

Pertumbuhan ekonomi telah menjadi perhatian sejumlah ekonom dan ulama Islam, yang telah menjelaskan bahwa gagasan tersebut melampaui sekadar aktivitas produksi. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi merupakan aktivitas yang mencakup seluruh aspek terkait produksi dan sangat erat kaitannya dengan keadilan distribusi. Ini adalah aktivitas manusia yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan dan peningkatan baik dalam aspek material maupun spiritual kehidupan manusia, bukan sekadar masalah ekonomi.¹²⁸ Fokus pembahasan di sini adalah bagaimana gagasan tentang ekspansi ekonomi telah ada dalam pemikiran Muslim kuno, di mana gagasan tersebut dieksplorasi dalam konteks “mengolah bumi” sebuah interpretasi yang diambil dari Surah Hud [11]:61 dalam Al-Quran:

¹²⁶ Lucas, Robert E. (1988). "On the mechanics of economic development," *Journal of Monetary Economics* 22: 42

¹²⁷ Todaro dan Smith, *Economic Devel* Lucas, Robert E. (1988). "On the mechanics of economic development," *Journal of Monetary Economics* 22: 3–42

¹²⁸ Abdullah Abdul Hasil Tariqi, *Ekonomi Islam-prinsip. Dasar dan tujuan*. Alih bahasa: M. Irfan Syofwani (Yogyakarta: Magistra Insani Press, 2004). 56

﴿وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَاقَوْمُ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ﴾

Artinya: “Dan Kami mengutus saudara mereka, Saleh, kepada kaum Thamud. “Wahai kaumku, sembahlah Allah; tidak ada tuhan bagi kalian selain Dia,” kata Saleh. Karena Dia telah menjadikan kalian makmur dengan menciptakan kalian dari tanah (debu), mohonlah ampunan-Nya, lalu bertobatlah dari dosa-dosa kalian. Sesungguhnya Tuhan-ku memang menerima (permohonan hamba-hamba-Nya) dan sangat dekat (dengan rahmat-Nya).” (QS. Hud: 61)¹²⁹

Ali bin Abi Talib mengatakan kepada salah satu gubernurnya di Mesir bahwa ungkapan “pengolahan tanah” mencakup gagasan tentang perluasan ekonomi: "Karena kemakmuran negeri adalah satu-satunya cara untuk memaksimalkan penerimaan pajak, Anda sebaiknya mengutamakan kemakmuran negeri daripada pemungutan pajak. Setiap negara yang memungut pajak tanpa mempertimbangkan kemakmuran negeri pada akhirnya akan bangkrut."

Pada kenyataannya, penekanan Islam terhadap ekspansi ekonomi sudah ada sebelum sistem kapitalisme atau Marxisme Barat. Hal ini dibuktikan oleh sejumlah studi tentang ekonomi global, yang menunjukkan bahwa umat Islam telah memberikan kontribusi signifikan terhadap kemakmuran ekonomi jauh sebelum orang-orang Barat. Sebagai contoh, dalam bab berjudul “Peradaban dan Cara Mewujudkannya” dalam bukunya *Muqaddimah* (784 H), Ibnu Khaldun membahas terminologi pertumbuhan ekonomi.¹³⁰ Kemudian, karya Abu Yusuf berjudul *Al-Kharaj*, di mana ia menguraikan rekomendasi bagi Khalifah Harun al-Rasyid untuk mengatur

¹²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, QS. Hud [11] ayat 61.

¹³⁰ Shadr ash Baqir, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna* (Jakarta: Zahra Publishing House, 2008), 208.

perpajakan, menggambarkan pentingnya pembahasan mengenai ekspansi ekonomi.¹³¹

F. Karakteristik Pertumbuhan Ekonomi Syariah

Tariqi (2004) menyebutkan ciri-ciri pertumbuhan ekonomi Islam sebagai berikut:¹³²

1. Komprehensif (*multidimensi*)

Jika dibandingkan dengan tujuan-tujuan mendasar yang pada akhirnya dijunjung tinggi oleh Islam, yaitu terwujudnya sebuah komunitas yang sempurna, masyarakat yang mewakili keadilan sosial melalui norma-norma buatan manusia tampak hampa.

2. Berimbang (*Tawazun*)

Menurut firman Allah dalam Surah Al-Ma'idah [5], pertumbuhan ekonomi Islam didasarkan pada keadilan distributif, bukan sekadar peningkatan produksi.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا هَقَّوْمِينَ - هَلَلٌ - شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا ءَنْ قَوْمٍ عَلَى ءَهْلٍ تَعْدِلُوا ءَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا ءَهْلًا - هَلَلٌ - خَيْرٌ ۚ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS.Al-Maidah: 8)¹³³

¹³¹ Baqir, *Buku Induk Ekonomi*, 204.

¹³² Lalu Iswandi, "Prinsip Dasar Pembangunan Dan Pertumbuhan Ekonomi Islam," *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 7, no. 2 (2013): 363–82.

¹³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Qs al-Maaidah [5]: Ayat 8.

Makna dari "...Berbuat adillah kamu sesungguhnya hal itu yang paling dekat dengan ketaatan... Dengan bersikap baik kepada semua orang, terlepas dari situasi mereka, keadilan pun tercapai. Dalam Islam, tujuan dari pertumbuhan ekonomi adalah untuk menjamin bahwa setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan untuk mencapai kecukupan, alih-alih hidup dalam kemiskinan.¹³⁴

3. Realistis.

Bersikap realistis berarti melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Pendekatan pragmatis terhadap pertumbuhan ekonomi ini menunjukkan bahwa Islam menanggapi segala masalah sosial dan ekonomi dalam masyarakat Muslim dengan memberikan solusi yang sama-sama praktis. Pendekatan Islam dalam memberantas kemiskinan merupakan contoh bagaimana Islam bersifat idealis sekaligus pragmatis. Dari sudut pandang praktis, Islam menyediakan sistem zakat untuk mengatasi kemiskinan.¹³⁵

4. Keadilan (*Al-Adl*)

Islam mendasarkan sistem hukumnya pada prinsip keadilan bagi manusia. Dalam beberapa ayat Al-Qur'an, Allah memerintahkan kita untuk menegakkan keadilan. Dalam ayat ke-90 Surah an-Nahl [16], Allah berfirman:¹³⁶

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝﴾

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kerabat, dan Allah melarang dari berbuat keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kamu agar kamu mendapat pelajaran." (QS.-an-Nahl: 90)¹³⁷

¹³⁴ M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Alqur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 200.

¹³⁵ Baqir, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna*, 147.

¹³⁶ Baqir, *Buku Induk Ekonomi*, 148.

¹³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, QS. An-Nahl [16] Ayat 90.

5. Bertanggung Jawab

Syariat Islam menguraikan kewajiban secara jelas dan tegas sebagai salah satu landasan terpenting.¹³⁸ Dengan mengikuti Syariat ini, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban memiliki dua aspek: a. pertanggungjawaban bersama di antara berbagai kelompok masyarakat, dan b. kewajiban negara terhadap masyarakat.

6. Memastikan ketersediaan yang cukup.

Islam tidak hanya menganut konsep pertanggungjawaban; pertanggungjawaban ini harus bersifat mutlak dan mampu menjamin kecukupan bagi setiap orang. Oleh karena itu, Islam membagi tugas ini di antara orang kaya, anggota keluarga, negara, dan mereka yang berkecukupan, sehingga kemampuan mereka secara bersama-sama menciptakan sinergi yang efektif untuk memerangi kemiskinan.¹³⁹

7. Mengutamakan Manusia (*Ukhuwah*)

Tujuan dan dampak kemajuan ekonomi dalam Islam ditandai oleh sifat ini, yang selaras dengan peran umat manusia sebagai wakil Allah di bumi. Tujuan pertumbuhan ekonomi Islam adalah menyediakan batasan yang cukup bagi setiap orang agar terbebas dari segala bentuk perbudakan, baik dalam ranah hukum maupun material, kecuali dalam hal beribadah kepada Allah SWT. Pertumbuhan ekonomi Islam berpusat pada manusia sebagai sumber daya manusia guna mencegah mereka menjadi terpinggirkan akibat kurangnya kebebasan, seperti dalam ekonomi sosialis, dan terikat pada barang-barang material seperti dalam sistem kapitalis.¹⁴⁰

a) a) menciptakan lapangan kerja yang menguntungkan, b) mendukung usaha kecil dan menengah, serta c) mendorong kreativitas dan inovasi dalam kegiatan ekonomi.

¹³⁸ Baqir, *Buku Induk Ekonomi*, 149.

¹³⁹ Baqir, *Buku Induk Ekonomi*, 169.

¹⁴⁰ Dimas Hari Santoso, *Indeks Pembangunan Manusia 2023*, vol. 18 (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2024), 87.

Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi Islam menganut pendekatan yang komprehensif, dengan mempertimbangkan faktor-faktor sosial, moral, spiritual, dan lingkungan selain keberhasilan ekonomi. Ekonomi Islam pada dasarnya berbeda dari ekonomi tradisional karena memandang aktivitas ekonomi sebagai kewajiban sosial dan ibadah, bukan sekadar sarana untuk memperoleh keuntungan finansial.

1. Religiusitas, Kemiskinan, Pendidikan dan Kesehatan

a. Teori Kemiskinan

Miskin menurut bahasa berasal dari bahasa Arab yang sebenarnya menyatakan kefakiran yang sangat. Allah SWT menggunakan istilah itu dalam Firman-Nya ;

﴿أَوْ مُسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ﴾

Artinya: "*atau orang miskin yang sangat fakir*" (Q.S. Al-Balad (90) : 16)¹⁴¹

Quraish Shihab menjelaskan ayat tersebut bahwa istilah "*sakana*," yang berarti tinggal atau hidup, merupakan akar kata "*miskin*." Tidak bergerak, tunduk, hina dan lemah.¹⁴² Dari makna di atas dapat tergambar bagaimana keadaan seseorang yang dinamai miskin.

Menurut Joseph E. Stiglitz tentang terminologi kemiskinan yang memiliki pandangan lebih multidimensional mengenai kemiskinan yang harus di perhitungkan dalam dimensi – dimensi pokok di antaranya: standar hidup materiil (pendapatan, konsumsi dan kekayaan), kesehatan, pendidikan, aktivitas individu termasuk bekerja, suara politik dan tatanan pemerintahan, hubungan dan kekerabatan

¹⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, .Q.S. Al-Balad (90) : 16.

¹⁴² Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Alqur'an*, 248.

sosial, lingkungan hidup (kondisi masa kini dan masa depan), dan kualitas hidup masyarakat.¹⁴³

Sosiolog Soerjono Soekamto mendefinisikan kemiskinan sebagai keadaan di mana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhannya sesuai dengan standar hidup kelompoknya dan tidak mampu memanfaatkan kemampuan fisik maupun mentalnya di dalam kelompok tersebut.

Ginanjari Kartasasmita, dalam teorinya, mengelompokkan penyebab kemiskinan ke dalam empat kategori utama, yaitu:

1) Kemiskinan Alami

Lingkungan yang tidak mendukung merupakan salah satu penyebab alami kemiskinan, bencana alam, atau keterbatasan sumber daya alam. Misalnya, masyarakat yang tinggal di daerah dengan tanah yang kurang subur atau di wilayah yang sering dilanda bencana alam seperti banjir atau gempa bumi cenderung lebih sulit untuk keluar dari kemiskinan. Faktor lingkungan ini sering kali berada di luar kendali individu atau komunitas dan memerlukan intervensi eksternal untuk diatasi.¹⁴⁴

2) Kemiskinan Mental

Kemiskinan mental berkaitan dengan pola pikir atau mindset individu. Orang yang memiliki mentalitas miskin cenderung pesimis, tidak berani mengambil risiko, atau kurang memiliki motivasi untuk memperbaiki kondisi hidupnya. Mereka mungkin juga kurang memiliki keterampilan atau pengetahuan yang diperlukan untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Mentalitas ini dapat dibentuk oleh lingkungan sosial dan

¹⁴³ Joseph E Stiglitz, Amartya Sen, dan Jean-Paul Fitoussi, *Mengukur Kesejahteraan: Mengapa Produk Domestik Bruto bukan Tolak Ukur yang tepat untuk Menilai Kemajuan?* (Jakarta: Marjin Kiri, 2011), 2022, https://www.helvry.com/wp-content/uploads/2020/03/2011-Marjin-Kiri_MengukurKesejahteraan.pdf.105-109

¹⁴⁴ Ginanjari Kartasasmita, *Kemiskinan Natural dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Sosial* (Jakarta: Penerbit Nasional, 2000), 45-47.

pendidikan yang kurang mendukung serta pengalaman hidup yang membatasi aspirasi individu.¹⁴⁵

3) Kemiskinan Spiritual

Kemiskinan spiritual merujuk pada kekurangan dalam aspek spiritual atau moral. Kurangnya nilai-nilai spiritual dan moral dapat menyebabkan seseorang atau sekelompok orang tidak memiliki etika kerja yang baik, tidak jujur, atau kurang memiliki rasa tanggung jawab. Hal ini bisa menghambat upaya mereka untuk keluar dari kemiskinan. Nilai-nilai spiritual dan moral yang kuat dianggap penting dalam membentuk karakter individu yang produktif dan berintegritas.¹⁴⁶

4) Kemiskinan Struktural

Tata kelola sosial dan ekonomi yang tidak adil atau tidak merata merupakan akar penyebab kemiskinan struktural. Ini termasuk ketidakadilan dalam distribusi sumber daya, kebijakan pemerintah yang tidak mendukung, atau suatu struktur ekonomi yang tidak memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang. Contohnya, diskriminasi dalam pekerjaan atau pendidikan bisa membuat kelompok tertentu sulit untuk meningkatkan taraf hidup mereka.¹⁴⁷

b. Penyebab Kemiskinan

Secara umum, ada dua cara untuk memandang kemiskinan:

- 1) Proses kemiskinan dapat dipandang sebagai sesuatu yang dinamis, rumit, dan multidimensi. Modal manusia yang berkualitas rendah, tingkat pendapatan dan konsumsi yang rendah, serta keterbatasan akses terhadap aset yang menjadi faktor produksi dan hasil yang dihasilkannya tenaga kerja, modal, tanah, dan teknologi semuanya

¹⁴⁵ Kartasasmita, *Kemiskinan Natural*, 52-54.

¹⁴⁶ Kartasasmita, *Kemiskinan Natural*, 60-62.

¹⁴⁷ Kartasasmita, *Kemiskinan Natural*, 70-73.

dapat menjadi faktor-faktor yang berkontribusi.

- 2) Di ranah sosial, politik, dan ekonomi (termasuk pasar), kemiskinan merupakan akibat sekaligus faktor yang berkontribusi terhadap proses-proses pengucilan atau marginalisasi. Proses-proses marginalisasi ini dapat terjadi berdasarkan gender.¹⁴⁸ kelas sosial-ekonomi, atau etnisitas. Hubungan antara kelima jenis kesulitan ini menciptakan sebuah perangkat yang berkepanjangan.¹⁴⁹ Dari sudut pandang psikologi, empat kondisi berikut ini dianggap sebagai penyebab kemiskinan:
 - a. *Al-Dha'if*: Suatu kondisi yang ditandai oleh berbagai kelemahan, termasuk kelemahan dalam semangat, pengetahuan dan akal budi, kesehatan fisik, atau kemampuan. Seseorang yang menderita penyakit ini tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai pemimpin atau sebagai wakil Allah (*khalifah*) di bumi secara seefektif mungkin.
 - b. *Al-Khaūf*: Suatu kondisi ketika seseorang begitu ketakutan sehingga tidak memiliki keberanian untuk bekerja, berjuang, berdagang, atau mengembangkan kemampuannya. Orang tersebut enggan mengambil risiko yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidupnya karena takut gagal, kehilangan uang, atau kehilangan harta.
 - c. *Kaslān*: Pola pikir malas yang mengakibatkan pemborosan waktu dan hilangnya kesempatan untuk mencapai potensi penuh seseorang. Pada dasarnya, setiap orang memiliki kemampuan untuk memenuhi keinginan mereka dalam hidup; namun demikian, kemalasan dapat menjadi faktor

¹⁴⁸ Muhammad bin Umar Bazmul, *Ahkām Al-Faqīr Wa Al-Miskīn Fi Al-Qur'ān Al-'Azīm Wa As-Sunnah An-Nabawīyyah* (Makkah: Universitas Ummul Quran, n.d.), 55.

¹⁴⁹ Emmhy Hamidiyah, *Pendayagunaan Zakat Untuk Pengentasan Kemiskinan Mungkinkah* (Jakarta: FOZ, 2006), 123.

yang mendorong seseorang ke dalam kemiskinan atau keterpurukan.

- d. *Al-Bakhīl*: Suatu keadaan di mana sifat kikir mendominasi. Sifat ini membuat seseorang enggan memberi atau berbagi apa yang dimilikinya dengan orang lain, dan lebih memilih untuk hanya menerima. Akibatnya, sifat kikir ini menghalangi orang tersebut untuk mengalokasikan sumber dayanya dan menjalankan tanggung jawab sosialnya.

Dalam pandangan Al-Ghazali, menjaga lima kepentingan ini merupakan bagian dari Maqasid Syariah. Maqasid Syariah Al-Ghazali didasarkan pada beberapa ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Diantaranya didalam Q.S Al Baqarah : 11:

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ﴾

Artinya: “Dan bila dikatakan kepada mereka: "Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi". Mereka menjawab: "Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan". (Q.S Al Baqarah : 11).¹⁵⁰

Untuk mencapai *falah* (kesuksesan/kesejahteraan), I-HDI berupaya mengukur tingkat kesejahteraan yang dicapai dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia. Konsep *Maqasid Syariah* dari Imam Al-Shatibi, yang membagi kebutuhan dasar manusia menjadi lima dimensi agama (*ad-din*), jiwa (*an-nafs*), akal (*al-aql*), keturunan/keluarga (*an-nasl*), dan kekayaan/harta (*al-mal*) menjadi dasar pengukuran ini. Apabila dari kelima dimensi ini ada yang tidak terpenuhi atau terjadi ketidakseimbangan maka tidak akan mencapai *falah* atau kebahagiaan tidaklah sempurna.¹⁵¹ Menurut Ahmad Ausaf, dalam Tiara Rochmawati, (2018) Strategi pembangunan Islam

¹⁵⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Q.S Al Baqarah : 11.

¹⁵¹ P3EI, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 56.

didasarkan pada empat prinsip filosofis: *tawhid*, *khilafah*, dan *tazkiyah*.

Pendekatan ini memberikan cakupan yang luas pada pembangunan ekonomi, yang mencakup unsur-unsur material, spiritual, dan moral.¹⁵²

c. Teori Religiusitas

Religiusitas adalah kedalaman seseorang dalam meyakini suatu agama disertai dengan tingkat pengetahuan terhadap agamanya yang diwujudkan dalam pengamalan nilai-nilai agama yakni dengan mematuhi aturan-aturan dan menjalankan kewajiban-kewajiban dengan keikhlasan hati dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan ibadah.¹⁵³ adapun Menurut Zakiyah Darajat dalam psikologi agama dapat difahami religiusitas merupakan sebuah perasaan, pikiran dan motivasi yang mendorong terjadinya perilaku beragama.¹⁵⁴ Disini manusia sangatlah membutuhkan agama untuk memenuhi kebutuhan rohani serta kebutuhan dalam ketenangan hati dikala mereka mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Hal ini dijelaskan dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 ;

﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾^{٢٨}

Artinya: “(Yaitu) Orang-Orang Yang Beriman Dan Hati Mereka Manjadi Tenteram Dengan Mengingat Allah. Ingatlah, Hanya Dengan Mengingati Allah-Lah Hati Menjadi Tenteram”.¹⁵⁵

¹⁵² Tiara Rochmawati, “Analisis Islamic Human Development Index (I-HDI) Di Yogyakarta Tahun 2015-2016 Dalam Perspektif Maqasid Syariah” (Universitas Islam Indonesia, 2018), 76,

¹⁵³ Glock dan Strak dalam Yunita Sari, A Fajri, dan T Syuriansyah, “Religiusitas Pada Hijabers Community Bandung,” in *Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan PKM: Sosial, Ekonomi, Dan Humaniora*, 2012, 312.

¹⁵⁴ Zakiyah Darajat dalam Purwati Lestari dan Jalaluddin, *Psikologi Agama* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012).57-58

¹⁵⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Q.S. Ar-Ra'd ayat 28.

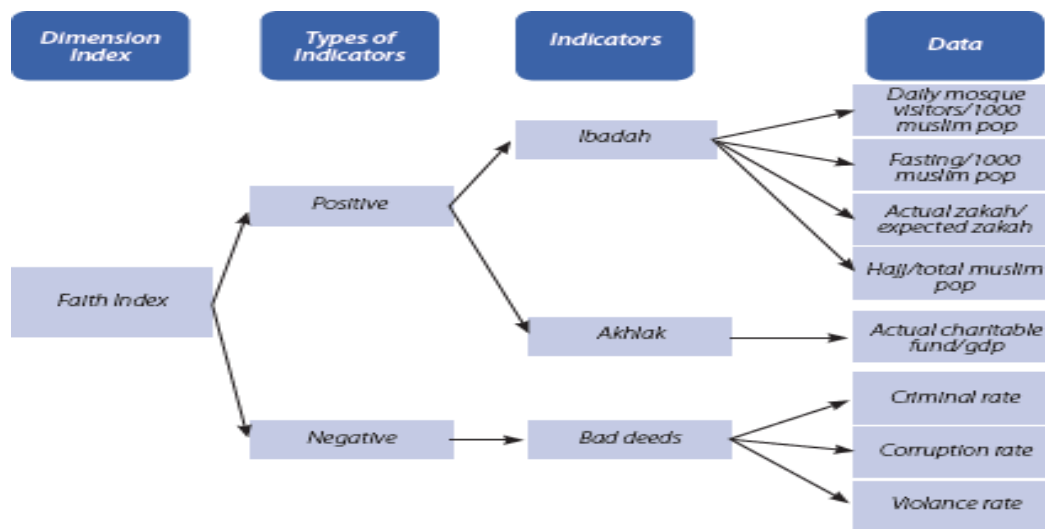
c. Dimensi Religiusitas menurut Imam Al- Syathibi dan Al-Ghazali:

Gagasan Maqāṣid al-Syarī‘ah Menurut Imam al-Ghazali dalam *al-Mustashfā*: Dalam karya klasiknya, *al-Mustashfā fī 'Ilm al-Uṣūl**, Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa tujuan utama Syariah adalah untuk melindungi lima prinsip dasar kehidupan: agama (*al-dīn*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-‘aql*), keturunan (*al-nasl*), dan harta (*al-māl*). Lima prinsip ini disebut sebagai “*al-kulliyat al-khams*”. Menurut al-Ghazali, seluruh hukum syariat harus bertujuan untuk menjaga salah satu dari lima aspek ini. Al-Ghazali membagi kemaslahatan (*maslahah*) ke dalam tiga tingkatan hirarkis.¹⁵⁶

- a. *Dharuriyyat*: Kebutuhan primer yang tanpanya kehidupan tidak dapat berjalan dengan baik. Contohnya termasuk hukum tentang larangan membunuh, kewajiban shalat, dan larangan mencuri.
- b. *Hajiyyat*: Kebutuhan sekunder yang diperlukan untuk menghilangkan kesulitan hidup. Contoh: rukhsah dalam shalat untuk musafir.
- c. *Tahsiniyyat*: Kebutuhan tersier yang memperindah dan menyempurnakan kehidupan, seperti adab, etika berpakaian, dan kesopanan dalam bermuamalah. Berikut Gambar dimensi indeks religiusitas yang dikemukakan oleh Al-Ghazali, yaitu sebagai berikut:¹⁵⁷

¹⁵⁶ Herdiansyah, “*Al-Muwafaqat Karya Masterpiece Imam Asy-Syatibi (W: 790 H/1388 M) (Kajian Historis, dan Kandungan Isi Kitab),” Jurnal Hukum: Das Sollen* 3, no. 1 (2019).

¹⁵⁷ Anto, “*Introduction An Islamic Human Development Index (I-HDI) To Measure Development In OIC Countries.*”⁸⁸



Gambar 1.9 Komponen Indeks Religiusitas¹⁵⁸

Sebagai indeks pembangunan manusia yang lengkap dan menyeluruh, Rama dan Yusuf mengusulkan Indeks Pembangunan Manusia Islam (I-HDI). Lima dimensi *maqāsid al-syarī'ah* agama (*dīn*), jiwa (*tazkiyah al-nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan kekayaan (*māl*) merupakan landasan yang menjadi dasar penyusunan indeks ini. Setiap dimensi diwakili oleh sejumlah indikator selama pengembangan indeks ini, seperti harapan hidup, yang merupakan ukuran kesehatan, dan rata-rata lama bersekolah, yang merupakan ukuran pendidikan. Berikut ini dijelaskan langkah-langkah yang diperlukan untuk memasukkan indikator-indikator tersebut ke dalam I-HDI.¹⁵⁹

d. Angka harapan hidup (Kesehatan)

Jumlah tahun rata-rata yang diperkirakan akan dijalani seseorang sejak lahir dikenal sebagai Harapan Hidup pada Saat Lahir (*Life Expectancy-e0*). Angka ini dihitung berdasarkan data dari survei

¹⁵⁸ Anto, "Introducing an Islamic Human Development Index (I-HDI) to Measure Development in OIC Countries," 2010.80

¹⁵⁹ Anto, "Introducing an Islamic Human Development Index (I-HDI) to Measure Development in OIC Countries," 2010.80-81

kependudukan dan sensus, serta mencerminkan kondisi kesehatan suatu populasi.

- e. Rata-rata Lama Pendidikan (RLP) (*Pendidikan/mean years of schooling – MYS*)

Jumlah tahun yang dihabiskan penduduk dalam menempuh pendidikan formal ditunjukkan oleh rata-rata lama pendidikan. Dalam keadaan normal, diperkirakan rata-rata lama pendidikan suatu wilayah tidak akan menurun. Indikator ini mengukur penduduk yang berusia 25 tahun ke atas.¹⁶⁰

Ukuran lamanya waktu (dalam tahun) yang dihabiskan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas di sekolah disebut Rata-rata Lama Sekolah (RLS). RLS didefinisikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai jumlah tahun pendidikan formal yang ditempuh oleh penduduk. Rumus berikut digunakan untuk menghitung RLS, yang merupakan ukuran tingkat dan kualitas pendidikan penduduk di suatu wilayah:¹⁶¹

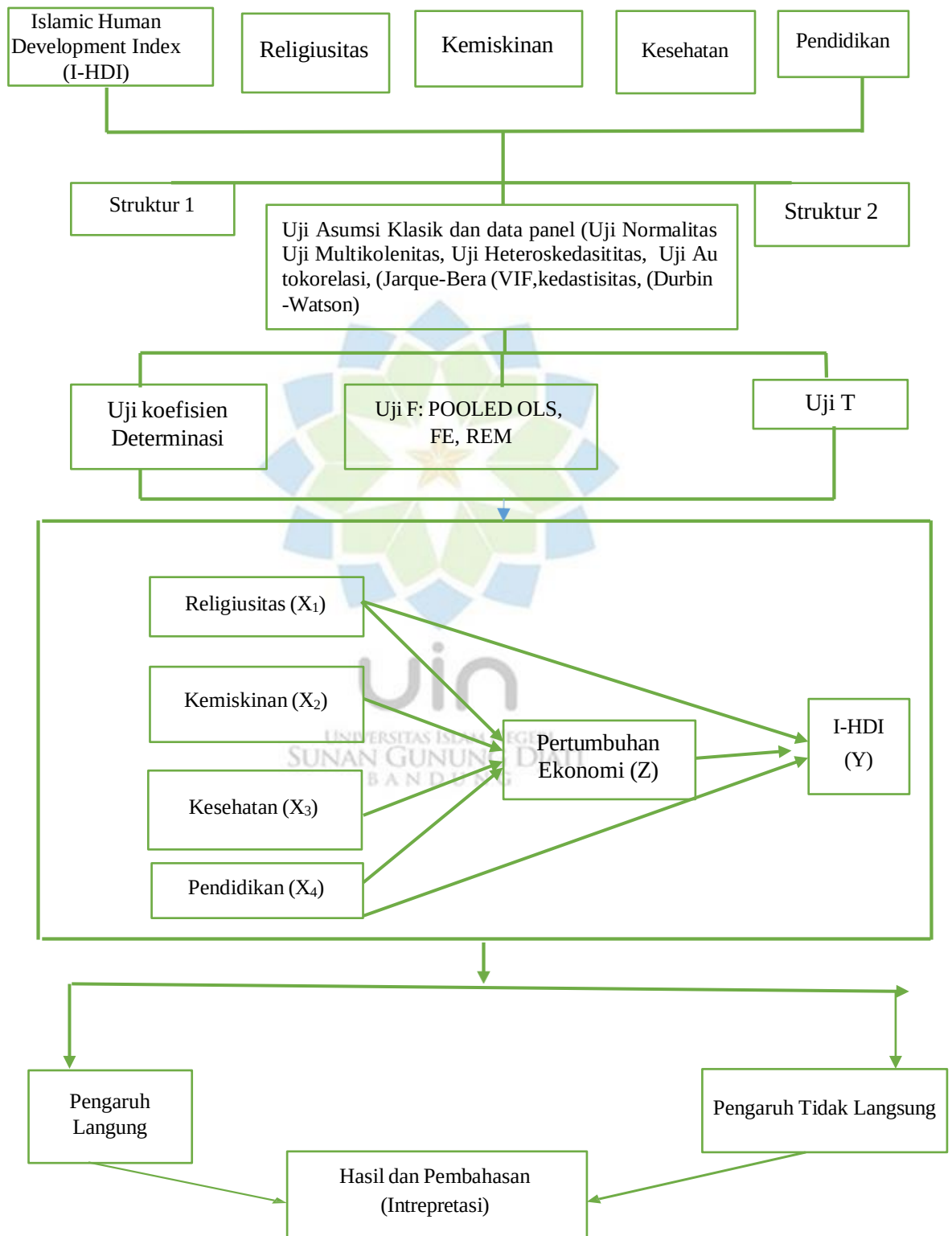
$$\begin{aligned} \text{life expectancy index} &= \frac{\text{life expectancy at birth} - 25}{85 - 25} \\ \text{Education Index} &= \frac{\text{MYS index} + \text{EYS index}}{2} \\ \text{Mean years of schooling (mys) index} &= \frac{\text{mean years of schooling} - 0}{15 - 0} \\ \text{Expected years of schooling (Eys) index} &= \frac{\text{expected years of schooling} - 0}{18 - 0} \\ \text{Income index} &= \frac{\ln[\text{GNI per capita}] - \ln[100]}{\ln[75.000] - \ln[100]} \\ \text{HDI} &= \frac{1}{3}(\text{life expectancy index}) + \frac{1}{3}(\text{education index}) + \frac{1}{3}\text{income index} \end{aligned}$$

¹⁶⁰ Badan Pusat Statistik, “Rata-rata Lama Sekolah (MYS),” Badan Pusat Statistik, 2025, diakses 24 Juli 2025, <https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/572>.

¹⁶¹ Anto, “Introducing an Islamic Human Development Index (I-HDI) to Measure Development in OIC Countries,” 2011., 80-85

Dimana:

Kerangka Pemikiran:



Gambar 1.10 Kerangka Pemikiran

G. Hipotesis

Hipotesis penelitian berikut ini dirumuskan berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya:

1. Dampak Langsung Variabel Penentu terhadap Pertumbuhan Ekonomi ($X \rightarrow Z$)

H₁: Dari tahun 2020 hingga 2024, perkembangan ekonomi Provinsi Jawa Barat (Z) dipengaruhi secara signifikan oleh tingkat keagamaan (X₁).

H₂: Dari tahun 2020 hingga 2024, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat (Z) dipengaruhi secara signifikan oleh tingkat kemiskinan (X₂).

H₃: Pada periode 2020 hingga 2024, pembangunan ekonomi Provinsi Jawa Barat (Z) dipengaruhi secara signifikan oleh kesehatan (X₃).

H₄: Pada periode 2020 hingga 2024, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat (Z) dipengaruhi secara signifikan oleh pendidikan (X₄).

2. Hipotesis Pengaruh Langsung Variabel Independen terhadap I-HDI ($X \rightarrow Y$)

Indeks Pembangunan Manusia Islam (I-HDI) (Y) di Provinsi Jawa Barat antara tahun 2020 dan 2024 dipengaruhi secara signifikan oleh tingkat keagamaan (X₁).

Di Provinsi Jawa Barat, kemiskinan (X₂) secara signifikan memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Islam (I-HDI) (Y) antara tahun 2020 dan 2024.

Indeks Pembangunan Manusia Islam (I-HDI) (Y) di Provinsi Jawa Barat antara tahun 2020 dan 2024 dipengaruhi secara signifikan oleh kesehatan (X₃).

Indeks Pembangunan Manusia Islam (I-HDI) (Y) di Provinsi Jawa Barat antara tahun 2020 dan 2024 dipengaruhi secara signifikan oleh pendidikan (X₄).

3. Hipotesis Pengaruh Langsung Variabel Mediasi terhadap I-HDI

($Z \rightarrow Y$)

Indeks Pembangunan Manusia Islam (I-HDI) (Y) di Provinsi Jawa Barat dipengaruhi secara signifikan oleh pertumbuhan ekonomi (Z) antara tahun 2020 dan 2024.

4. Hipotesis Pengaruh Tidak Langsung (Mediasi) ($X \rightarrow Z \rightarrow Y$)

H₁₀: Pengaruh religiositas (X₁) terhadap Indeks Pembangunan Manusia Islam (I-HDI) (Y) di Provinsi Jawa Barat antara tahun 2020 dan 2024 dimediasi oleh pertumbuhan ekonomi (Z).

H₁₁: Dampak kemiskinan (X₂) terhadap Indeks Pembangunan Manusia Islam (I-HDI) (Y) di Provinsi Jawa Barat antara tahun 2020 dan 2024 dimediasi oleh pertumbuhan ekonomi (Z).

H₁₂: Dampak kesehatan (X₃) terhadap Indeks Pembangunan Manusia Islam (I-HDI) (Y) di Provinsi Jawa Barat antara tahun 2020 dan 2024 dimediasi oleh pertumbuhan ekonomi (Z).

H₁₃: Pengaruh pendidikan (X₄) terhadap Indeks Pembangunan Manusia Islam (I-HDI) (Y) di Provinsi Jawa Barat antara tahun 2020 dan 2024 dimediasi oleh pertumbuhan ekonomi (Z).

H. Kajian Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian mengenai pengaruh kemiskinan, kesehatan, pendidikan, dan agama terhadap I-HDI melalui pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat antara tahun 2020 dan 2024 disajikan di bawah ini.

Berikut ini adalah tabel penelitian-penelitian sebelumnya:

Tabel 1.8 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
1.	M. Zidny.nafi' habsi	Pengaruh Zakat, Pertumbuhan Ekonomi, dan	Kuantitatif,	Variabel pertumbuhan ekonomi memiliki korelasi positif sebesar 0,888

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
	(2023)	Kebijakan Fiskal terhadap Indeks Pembangunan Manusia Islam Indonesia: Dari Perspektif <i>Maqasid Syariah</i>		terhadap IPM dan 0,023 terhadap I-IPM, berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Temuan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memengaruhi baik IPM maupun I-IPM. Sementara itu, variabel fiskal pendidikan memiliki koefisien negatif sebesar -0,278 untuk I-HDI dan -0,347 untuk HDI. Temuan ini menunjukkan bahwa baik HDI maupun I-HDI tidak dipengaruhi oleh pengeluaran fiskal untuk pendidikan. Variabel fiskal kesehatan memiliki koefisien sebesar -0,157 untuk I-HDI dan 6,716 untuk HDI. Berdasarkan hasil pengujian, variabel kesehatan memiliki dampak negatif terhadap HDI tetapi berdampak positif terhadap I-HDI. Selain itu, variabel zakat memiliki koefisien positif sebesar 0,077 untuk I-HDI dan 2,061 untuk HDI. Akibatnya, baik HDI maupun I-HDI dipengaruhi oleh variabel zakat. ¹⁶²
2.	Kity aiu viollla, (2021)	Pengaruh belanja modal, pertumbuhan ekonomi, dan kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Islam	Kuantitatif, dengan ordinary least square regression analysis (OLS) dan data Panel.	Variabel-variabel independen yang secara bersamaan memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Islam (<i>islamic-human developmen index</i> I-HDI) di Provinsi Jawa Tengah meliputi

¹⁶² M Zidny Nafi Hasbi, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kebijakan Fiskal, dan Zakat terhadap Islamic Human Development Index (I-HDI) di Indonesia Perspektif Maqasid Al-Shari Ah" (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023).

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
		(I-HDI) Jawa Tengah, 2006–2009		pertumbuhan ekonomi, modalitas, dan kemiskinan.. ¹⁶³
3.	Dwi heriyanto, (2015)	Sebuah kajian mengenai variabel-variabel yang memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Islam (I-HDI).	Kuantitatif, analisis regresi persamaan regresi linier berganda (data panel)	Perekonomian daerah memberikan nilai Signifikan positif Terhadap islamic-human developmen index (I-HDI), sarana pendidikan dan kesehatan masing-masing memberikan pengaruh positif terhadap IPM, dan penduduk miskin berpengaruh negatif terhadap islamic-human developmen index (I-HDI). ¹⁶⁴
4.	Miladiyati Isnaini, 2024, (2013)	Pengaruh Angkatan Kerja dan Indeks Pembangunan Manusia Islam terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Barat (2019–2021), dengan Pengangguran sebagai Variabel Perantara.	Kuantitatif, analisis panel data e-views	Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pada sub-struktur 1, nilai statistik t untuk variabel angkatan kerja dan I-HDI masing-masing sebesar -2,085890 dan 3,670585; karena nilai-nilai ini lebih besar dari 1,96, kedua faktor tersebut secara signifikan memengaruhi tingkat pengangguran. Nilai statistik t pada sub-struktur 2 adalah 1,9696606 untuk I-HDI, -2,514212 untuk angkatan kerja, dan -5,055311 untuk pengangguran; karena nilai-nilai ini lebih besar dari 1,96, dapat disimpulkan bahwa ketiga faktor tersebut berdampak pada

¹⁶³ Aiu Viollani, Siswanto, dan Suprayitno, “Pengaruh islamic human development index dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan dengan pengangguran sebagai variabel intervening.”

¹⁶⁴ Dwi Heriyanto, “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi islamic-human development index (I-HDI).” (2015).

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
				pertumbuhan ekonomi. Pengangguran tidak berperan sebagai mediator dalam pengaruh I-HDI terhadap pertumbuhan ekonomi, berdasarkan nilai Z yang dihitung dari uji Sobel sebesar -3,672 ($< 1,96$); namun, pengangguran berperan sebagai mediator dalam pengaruh angkatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai Z yang dihitung sebesar 2,082 ($> 1,96$). ¹⁶⁵
5.	Erica nova vira, (2023)	<i>Analisis of islamic human development index (I-HDI), Economic growth and unemployment rate on poverty in indonesia for the 2013-2022 period.</i>	Dalam metode kuantitatif ini, digunakan analisis regresi data panel, dan model efek acak (REM) digunakan untuk memperkirakan parameter model. Data panel dari tahun 2010 hingga 2014 digunakan dalam penelitian ini.	<i>Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan memanfaatkan data deret waktu dari tahun 2013 hingga 2022 serta data sekunder dari BPS. Pengolahan data dilakukan menggunakan SPSS versi 23. Temuan penelitian menunjukkan bahwa variabel tingkat pengangguran memiliki dampak positif terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia, sedangkan variabel I-HDI memiliki dampak negatif. Di sisi lain, kemiskinan tidak dipengaruhi oleh variabel pertumbuhan ekonomi. Temuan penelitian ini sekaligus menunjukkan bahwa setiap variabel x memiliki dampak terhadap variabel Y. Nilai r kuadrat</i>

¹⁶⁵ Miladiyati Isnaini, "Pengaruh Islamic Human Development Index dan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Pengangguran sebagai Variabel Intervening di Jawa Timur tahun 2019-2021"

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
				sebesar 9,79% dan 2,1% tidak dapat dijelaskan oleh penelitian ini, yang menjadikannya menarik karena angka-angka tersebut menunjukkan kualitas model penelitian. ¹⁶⁶
6.	Farah Hamidah Nuruz-Zahrah, (2023)	Pengaruh peluang kerja, upah minimum, dan Indeks Pembangunan Manusia Islam (I-HDI) terhadap kemiskinan, dengan pengangguran berperan sebagai variabel perantara.	Kuantitatif dengan menggunakan Regresi linier data pada SPSS.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengangguran dipengaruhi secara langsung, negatif, dan signifikan oleh peluang kerja. Kemiskinan dipengaruhi secara langsung, negatif, dan signifikan oleh upah minimum dan Indeks Pembangunan Manusia Islam (i-HDI). Meskipun demikian, tidak ada faktor yang secara signifikan memengaruhi kemiskinan secara tidak langsung melalui tingkat pengangguran. ¹⁶⁷
7.	Cut Risya Varlitya, (2017)	Tingkat Kemiskinan, Pengangguran, Indek Zakat, Pertumbuhan Ekonomi Dan <i>Islamic-Human Development Index</i> .	Kuantitatif dengan data panel pada 12 kabupaten di jambi	Temuan studi ini menunjukkan bahwa Indeks Zakat Nasional dan tingkat kemiskinan memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi, namun tingkat pengangguran terbuka tidak memiliki pengaruh serupa. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia Islam (I-HDI) dipengaruhi secara signifikan oleh Indeks

¹⁶⁶ Vinta dan Rosyidah, "Analysis of the Islamic Human Development Index (I-HDI), Economic Growth and Unemployment Rate on Poverty in Indonesia for the 2013-2021 period."87-88

¹⁶⁷ Farah Hamidah Nuruz Zahrah, "Pengaruh Islamic Human Development Index (I-Hdi), Kesempatan Kerja, Dan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan Dengan Pengangguran Sebagai Variabel Intervening" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).70-73

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
				Zakat Nasional, namun I-HDI tidak terlalu dipengaruhi oleh tingkat kemiskinan maupun tingkat pengangguran terbuka. I-HDI di Provinsi Jambi juga sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi. Dari segi dampak tidak langsung, I-HDI dipengaruhi oleh Indeks Zakat Nasional, tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran terbuka melalui variabel perantara pertumbuhan ekonomi. ¹⁶⁸
8.	Agus tri basuki, (2020)	Faktor-faktor penentu Analisis data panel mengenai pertumbuhan ekonomi regional dan Indeks Pembangunan Manusia Islam (2008–2018). (studi kasus 20 Provinsi di Indonesia)	Pendekatan panel statis dan panel dinamis (panel VECM) Dari tahun 2008-2018.	Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam jangka panjang (panel VECM) belanja pendidikan, dan alokasi umum, jumlah penduduk miskin memiliki dampak merugikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Indeks Pembangunan Manusia Islam dan pertumbuhan ekonomi regional dipengaruhi secara positif oleh pengeluaran di bidang pendidikan, pertanian, perikanan, dan urusan kelautan, serta investasi asing langsung, berdasarkan hasil analisis data panel statis. ¹⁶⁹

¹⁶⁸ Cut Rasya Varlitya, “Tingkat Kemiskinan, Pengangguran, Indeks Zakat, Pertumbuhan Ekonomi Dan Islamic-Human Development Index.,” 2017.93

¹⁶⁹ Agus Tri Basuki, “Faktor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi daerah terhadap Islamic-indeks pembangunan manusia 2008- 2018 pendekatan data panel (studi kasus 20 provinsi di Indonesia),” 2020.45-46

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
9.	Diah lasarati, (2018)	Analisis pengaruh penyaluran dana ZIS, PDRB per kapita, dan kemiskinan tentang Indeks Pembangunan Manusia Islam (I-HDI) Indonesia antara tahun 2013 dan 2016.	Kuantitatif data panel dengan Random effect. 2013-2016	Variabel Indeks Pembangunan Manusia Islam (I-HDI) dipengaruhi secara positif oleh variabel ZIS dan GRDP, dengan nilai korelasi masing-masing sebesar 0,153111 dan 3,199995; di sisi lain, variabel kemiskinan memiliki pengaruh negatif terhadap variabel I-HDI, dengan koefisien korelasi sebesar -0,343672. Sementara itu, variabel I-HDI dipengaruhi secara bersamaan oleh ZIS, GRDP, dan kemiskinan, sehingga menghasilkan nilai R-Square yang Disesuaikan sebesar 0,604940. ¹⁷⁰
10.	Sussy Susanti, (2013)	Pengaruh Analisis Data Panel mengenai Dampak Produk Domestik Regional Bruto, Tingkat Pengangguran, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan di Jawa Barat	Kuantitatif, pendekatan analisis yang tidak hanya mempertimbangkan data <i>cross section</i> namun juga menggunakan <i>data time series</i> .	Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa antara tahun 2009 dan 2011, tingkat kemiskinan di Jawa Barat sangat dipengaruhi oleh PDB Regional, tingkat pengangguran, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). ¹⁷¹

¹⁷⁰ Diah Larasati, "Analisis pengaruh penyaluran dana ZIS, PDRB per kapita, dan kemiskinan terhadap Islamic-human development index (I-HDI di Indonesia tahun 2013-2016." (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), 66

https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/39602/3/DIAH_LARASATI-FEB.pdf. 60

¹⁷¹ Sussy Susanti, "Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan di Jawa Barat dengan Menggunakan Analisis Data Panel," *Jurnal Matematika Integratif* 9, no. 1 (November 2016): 1–18, <https://doi.org/10.24198/jmi.v9.n1.9374.1-18.34>

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
11	Rukiah, Amiur Nuruddin, Saparuddin Siregar (2019)	Indeks Pembangunan Manusia Islam Indonesia (Pendekatan Maqasid Syariah)	Kuantitatif	Berdasarkan penelitian, masih terdapat perbedaan-perbedaan dan Indeks Pembangunan Manusia Islam (IPMI) masih rendah di seluruh provinsi di Indonesia. Indeks Pembangunan Manusia Islam (IPMI) lebih dipengaruhi oleh kesejahteraan non-material daripada kesejahteraan material. ¹⁷²
12	Natasya Anggraini, Purbayu Budi Santosa, dkk	Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Islam (I-HDI), Pengangguran, Ketimpangan Pendapatan, dan Upah Minimum Kabupaten terhadap Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode 2009 hingga 2022	Kuantitatif	Hal ini secara signifikan menurunkan tingkat kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, penelitian ini mengungkapkan bahwa kemiskinan sangat dipengaruhi oleh ketimpangan pendapatan dan pengangguran, dengan pengangguran berperan sebagai variabel perantara. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan I-HDI dapat berkontribusi pada penurunan tingkat kemiskinan di wilayah tersebut, terutama melalui pengurangan pengangguran dan perluasan peluang kerja. ¹⁷³

¹⁷² Rukiah, Amiur Nuruddin, dan Saparuddin Siregar, "Islamic Human Development Index Di Indonesia (Suatu Pendekatan Maqhasid Syariah)," *Istinbath* 18, no. 2 (2020): 307–27.

¹⁷³ Natasya Anggraini dan Purbayu Budi Santosa, "Pengaruh Islamic Human Development Index, Pengangguran, Ketimpangan Pendapatan, dan Upah Minimum Kabupaten Terhadap Kemiskinan (Studi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode Tahun 2009-2022)," *JIEI (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam)* 10, no. 3 (2024): 3144–53, <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/15079.98>

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
13	Dewi Kurniasari, (2024)	Pendapatan Perkapita Pertumbuhan Ekonomi Indeks Pembangunan Manusia Dan Tingkat Kemiskinan Di Jawa Barat	Kualitatif	Pada penelitian ini menghasilkan bahwa PT. Unilever Indonesia telah menerapkan berbagai strategi green economy yang sesuai dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah. Beberapa pencapaian yang dicapai meliputi pengurangan emisi karbon, penggunaan bahan ramah lingkungan, dan program-program sosial yang mendukung kesejahteraan masyarakat sekitar. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan green Economy berbasis Maqashid Syariah dapat membantu mencapai pembangunan berkelanjutan yang adil dan berkelanjutan. ¹⁷⁴
14	Chairani, 2020	Pengaruh Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia Islam (I-HDI) Provinsi Sumatra Barat (2017–2020)	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi secara signifikan memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Islam (I-HDI) ketika dianalisis secara terpisah, dengan nilai signifikansi sebesar 0,0265 yang berada di bawah tingkat signifikansi 5%. Dengan nilai signifikansi sebesar 0,3997, yang lebih tinggi dari tingkat signifikansi 5%, variabel kemiskinan tidak memiliki dampak yang dapat diidentifikasi terhadap Indeks

¹⁷⁴ Dewi Kurniasari, “Pendapatan Perkapita Pertumbuhan Ekonomi Indeks Pembangunan Manusia Dan Tingkat Kemiskinan Di Jawa Barat” (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024).96

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
				Pembangunan Manusia Islam (I-HDI). Namun, ketika dianalisis secara bersamaan, kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi secara signifikan memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Islam (I-HDI) Provinsi Sumatera Barat antara tahun 2017 dan 2020. ¹⁷⁵
15	Prasetyo, A. B., & Nurhayati, S.(2020)	Pengaruh ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi terhadap I-HDI Jawa Barat. Jurnal Ekonomi, 8(1), 22-35.	Kualitatif	Penelitian ini menyoroti bagaimana ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi memengaruhi I-HDI elemen tambahan yang tidak termasuk dalam penelitian ini. ¹⁷⁶
16	Rizal NurFauzan, (2023)	Dampak Pengangguran, Pendidikan, dan Kemiskinan di Jawa Barat	Kuantitatif	Pengaruh kemiskinan (X1), pendidikan (X2), dan pengangguran (X3) terhadap Indeks Pembangunan Manusia diteliti melalui analisis data dengan menggunakan model regresi data panel yang memanfaatkan perangkat lunak EViews. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan (X1) memiliki dampak negatif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, sedangkan pendidikan (X2) dan pengangguran (X3) memiliki dampak positif dan signifikan. Selain itu, Indeks Pembangunan

¹⁷⁵ Chairani, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan terhadap Islamic Human Development Index (I-HDI) di Provinsi Sumatera Barat tahun 2017-2020” (UIN Imam Bonjol Padang, 2020).⁶⁷

¹⁷⁶ A B Prasetyo dan S Nurhayati, “Dampak Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan terhadap I-HDI di Jawa Barat,” *Jurnal Ilmu Ekonomi* 8, no. 1 (2020): 22–35.

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
				Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Barat dipengaruhi secara signifikan oleh kemiskinan, pendidikan, dan pengangguran secara bersama-sama. ¹⁷⁷
17	Ghilman Muhammad Hifzanaddin (2019)	Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Islam terhadap Rasio Gini dan Tingkat Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta (2009–2018)	Kuantitatif	Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa rasio Gini dan tingkat kemiskinan dipengaruhi secara negatif namun dalam tingkat yang dapat diabaikan oleh Indeks Pembangunan Manusia Islam (I-HDI). Diharapkan penelitian ini dapat memberikan perspektif baru dan mendukung penelitian-penelitian sebelumnya, serta dapat dijadikan landasan bagi pengambilan keputusan ekonomi pemerintah, terutama yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan dan rasio Gini. ¹⁷⁸
18	Yesi Anggraeni, (2016)	Pengaruh kemiskinan, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia Jawa Barat, 2010–2013.	Kuantitatif	Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa antara tahun 2010 dan 2013, Indeks Pembangunan Manusia dipengaruhi secara positif oleh variabel pertumbuhan ekonomi (0,177000561), dipengaruhi secara negatif dan signifikan oleh variabel pengangguran (-0,079668), serta dipengaruhi secara negatif namun tidak signifikan

¹⁷⁷ Rizal Nurfausan, “Pengaruh Kemiskinan, Pendidikan, Dan Pengangguran Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Barat” (Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, 2023).75

¹⁷⁸ Hifzanuddin, “Pengaruh Islamic- Human Development Index Terhadap Tingkat Kemiskinan Dan Rasio Gini Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2018.”78

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
				oleh kemiskinan. Dengan koefisien determinasi sebesar 0,946821, variabel-variabel independen kemiskinan, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi menjelaskan 94,6821% variasi pada variabel dependen (Indeks Pembangunan Manusia), sedangkan variabel-variabel di luar cakupan penelitian ini menjelaskan 5,3179% sisanya. ¹⁷⁹
19	Iim Koyimah 1, A. Jajang W. Mahri, (2020)	Analysis Of Human Development With The Islamic Human Development Index (IHDI) In West Java Province In 2014- 2018	Kuantitatif	<i>With a total sample size of 21, the sample saturation method was employed in this investigation. According to this report, the West Java Province-based IHDI's human development is not at its best. The value of an index-nasl and al-maal index is low because of the ad-dien-index value. Cimahi, Bogor, and Bandung have IHDI values in the middle range, although the average IHDI value for the city and county is low. With an index value of ad-deen, an-nafs index, and al-aql al-maal, Bandung received the highest value among the three IHDI cities and counties. It is anticipated that this study will help the government enhance the caliber of the human development-based</i>

¹⁷⁹ Yesi Anggraeni, "Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia di jawa barat periode 2010-2013" (2016).90

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
				<i>IHDI</i> . ¹⁸⁰
20	Mb H Endrie Anto, (2014)	Developing an Islamic Human Development Index (I H D I) to Track OIC Development	Kualitatif	The results demonstrate a small difference in the rank composition between I-HDI and HDI. On the one hand, some nations have higher I-HDI rankings than HDI rankings. However, a few of nations experience a noticeable decline in their standing. Middle Eastern countries continue to dominate the I-HDI high score category, while African countries continue to dominate the bottom line. The material welfare index (MWI) generally contributes more to the overall I-HDI, indicating the significance of material wealth. ¹⁸¹

Berbeda dengan penelitian-penelitian lain, penelitian ini mengkaji pengaruh kemiskinan, harapan hidup, rata-rata tahun pendidikan, dan agama terhadap Indeks Pembangunan Manusia Islam di Provinsi Jawa Barat, yang dimediasi oleh pertumbuhan ekonomi pada periode 2020–2024.

¹⁸⁰ Lim Koyimah, A Jajang W Mahri, dan Aas Nurasyiah, “Analysis Of Human Development With The Islamic Human Development Index (IHDI) In West Java Province In 2014-2018,” *Review of Islamic Economics and Finance* 3, no. 2 (2020).99

¹⁸¹ M B Hendrie Anto, “Introducing an Islamic Human Development Index (I-HDI) to Measure Development in OIC,” *Jurnal Islamic Economic Studies* 9, no. 2 (2014).88

Tabel 1.9 Novelty Penelitian

Aspek	Penelitian Terdahulu	Novelty Penelitian Ini
Variabel mediasi	Belum ada yang menggunakan pertumbuhan ekonomi sebagai mediasi (kecuali Miladiyati, 2024 dengan arah terbalik)	Pertumbuhan ekonomi sebagai variabel mediasi (Z)
Variabel religiusitas	Masih jarang diuji secara kuantitatif	<i>Faith Index</i> sebagai proksi religiusitas
Cakupan wilayah	Terbatas (Jateng, Jambi, DIY, Sumbar)	21 kab/kota di Jawa Barat (terluas)
Periode penelitian	Sebagian besar sebelum pandemi (2010-2019)	2020-2024 (termasuk pandemi & pemulihan)
Metode analisis	Regresi sederhana, tanpa uji mediasi lengkap	Regresi data panel + Path analysis + Sobel test
Uji pemilihan model	Sering diabaikan	Chow test, Hausman test, LM test lengka

I. Definisi Operasional

Untuk memperjelas arah dan fokus kajian dalam penelitian ini, peneliti akan menjelaskan beberapa istilah teknis (definisi operasional) terkait topik penelitian ini, Yaitu Sebagai Berikut:

1. Religiusitas (X_1)

Religiusitas adalah potensi beragama atau berkeyakinan kepada tuhan dengan kata lain percaya adanya kekuatan di luar dirinya yang mengatur hidup dan kehidupan alam semesta.¹⁸² Tingkat religiusitas seseorang dapat ditentukan oleh tinggi rendahnya masing-masing aspek religius yang dimiliki oleh individu yang bersangkutan. Adapun ciri-ciri individu yang mempunyai tingkat religiusitas tinggi dapat dilihat dari tindakan, sikap dan perkataan serta seluruh jalan hidupnya mengikuti

¹⁸² Kemal Faza Akhyar dan Diesyana Ajeng Pramesti, “Pengaruh Religiusitas dan Sertifikasi Halal terhadap Keputusan Pembelian (Studi Empiris Pada Japanese Food Restaurant di Magelang),” *2nd Prosiding Business and Economics Conference in Utilizing of Modern Technology* 13, no. 1 (2019): 609–19.

aturan-aturanyang diajarkan oleh agama.¹⁸³ Religiusitas adalah hubungan batin antara manusia dengan Tuhan yang dapat mempengaruhi kehidupannya. Hubungan batin antara manusia dengan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari seperti menjalankan ibadah.¹⁸⁴ dalam variabel ini adanya hubungan teoritis bahwa dimensi spiritual (*hifdz ad-din*) yang merupakan masyarakat religius cenderung memiliki kontrol sosial kuat yang menekankan perilaku menyimpang seperti kriminalitas dan bahkan korupsi. studi di Indonesia menunjukkan, daerah dengan tingkat religiusitas tinggi memiliki indeks kebahagiaan lebih baik,¹⁸⁵ yang berkaitan dengan variabel Indeks Pembangunan Manusia Islam (I-HDI) .

2. Kemiskinan (X₂)

Kemiskinan adalah Secara terminologi ahli fikih dalam empat mazhab memiliki pendapat yang berbeda dalam menyikapi fakir dan miskin. Pendapat mereka terbagi dalam dua kelompok, yaitu kelompok Syafi'i dan Hambali, dengan kelompok Hanafi dan Maliki. Pendapat kelompok Syafi'i dan Hambali menerangkan bahwa yang disebut sebagai orang miskin adalah seseorang yang dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka tidak memiliki kemampuan, baik untuk dirinya mau pun keluarganya meski mereka memiliki pekerjaan dan pendapatan. Sedangkan pendapatnya tentang orang fakir adalah seseorang yang sama sekali tidak memiliki penghasilan dikarenakan uzur syar'i, misalnya umur yang sudah tua, mengalami sakit-sakitan, serta orang-orang yang tidak sempat mencari nafkah oleh karena kesibukannya dalam berdakwah. Miskin berdasarkan

¹⁸³ P Arviana, "Pengaruh Religiusitas dan Label Halal terhadap Keputusan Pembelian pada Produk Daging Olahan (Studi pada Konsumen Muslim Nadia Food Supplies Makassar)" (UIN Alauddin Makassar, 2020),21, <http://repositori.uinalauddin.ac.id/18187/>.

¹⁸⁴ Muhammad Nasrullah, "Islamic Branding, Religiusitas Dan Keputusan Konsumen Terhadap Produk.," *Jurnal Hukum Islam* 13, no. 79 (Desember 2015): 79–87, <https://doi.org/10.28918/jhi.v13i2.487>.

¹⁸⁵ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, *Tingkat Kebahagiaan Penduduk Jawa Barat* (Bandung: BPS Provinsi Jawa Barat, 2017), diakses 22 Juli 2025, <https://jabar.bps.go.id/id/publication/2017/12/28/d956adcb13cf7da758457a4f/tingkat-kebahagiaan-penduduk-jawa-barat-2017.html>.

pendapat mazhab Hanafi dan Maliki adalah tidak memiliki sesuatu apa pun. Sedangkan fakir adalah mereka yang memiliki harta akan tetapi belum mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.¹⁸⁶

Menurut Shirazi (1994) Dari sudut pandang ekonomi, sosial, psikologis, atau spiritual, kemiskinan adalah keadaan di mana seseorang tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya demi kehidupan yang layak.¹⁸⁷

3. Kesehatan (Angka Harapan Hidup) (X₃)

Harapan Hidup (AHH) adalah indikator yang digunakan untuk menilai kesehatan seseorang dalam suatu komunitas. Rata-rata jumlah tahun yang diperkirakan dapat dijalani seseorang dikenal sebagai harapan hidup (AHH). Usia yang mungkin dicapai oleh seseorang yang lahir pada tahun tertentu dikenal sebagai harapan hidup (AHH). Perhitungan harapan hidup dilakukan dengan metode tidak langsung (estimasi tidak langsung). Harapan Hidup (AHH) dihitung menggunakan dua jenis data: Bayi yang Lahir Hidup (ALH) dan Bayi yang Masih Hidup (AMH). Sementara itu, nilai harapan hidup maksimum dari UNDP digunakan untuk menentukan indeks harapan hidup. Di mana 85 tahun adalah usia maksimum di mana indeks tersebut dapat dihitung, dan 25 tahun adalah yang terendah (menurut standar UNDP). Jika kesehatan, pola makan, dan lingkungan seseorang baik, ia dapat hidup panjang umur.¹⁸⁸

4. Pendidikan (Rata-Rata Lama Sekolah, Harapan Lama sekolah (X₄)

Tingkat pendidikan penduduk di suatu wilayah ditunjukkan oleh rata-rata lama sekolah; rata-rata yang lebih tinggi mengindikasikan tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Pendidikan tinggi umumnya dianggap berkaitan dengan kualitas yang lebih baik pada seseorang, terutama dalam

¹⁸⁶ Irfan Sauqi Beik dan Laili Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah* (Bogor: IPB Press, 2016), 68.

¹⁸⁷ Beik dan Arsyianti,, *Ekonomi Pembangunan*, 68.

¹⁸⁸ Ismaini Zain dan Ayunanda Melliana, “Analisis Statistika Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur dengan Menggunakan Regresi Panel,” *Jurnal Sains dan Seni ITS* 2, no. 2 (2013): D237–42.

hal sikap dan kebiasaan perilaku. Jumlah total tahun yang dihabiskan penduduk untuk menempuh pendidikan formal dikenal sebagai rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah di suatu wilayah dianggap tidak akan menurun dalam keadaan normal. Penduduk yang berusia 25 tahun ke atas merupakan kelompok yang diperhitungkan dalam perhitungan ini.¹⁸⁹

- a. Rata-rata Lama Pendidikan (RLP): Jumlah tahun yang dihabiskan penduduk dalam menempuh pendidikan formal disebut sebagai Rata-rata Lama Pendidikan. Dalam keadaan normal, diharapkan rata-rata lama pendidikan suatu wilayah tidak akan menurun. Penduduk berusia 25 tahun ke atas merupakan kelompok yang digunakan untuk menghitung rata-rata lama pendidikan.
- b. Jumlah tahun pendidikan formal yang diperkirakan akan diselesaikan oleh seorang anak pada usia tertentu di masa depan dikenal sebagai Tahun Pendidikan yang Diharapkan ((*Expected Years of Schooling-EYS*). Perhitungan ini didasarkan pada asumsi bahwa kemungkinan seorang anak untuk melanjutkan pendidikannya di usia yang lebih tua setara dengan persentase penduduk dalam kelompok usia tersebut yang terdaftar di sekolah pada saat pengukuran dilakukan. Dengan menghitung lamanya masa sekolah yang dapat diselesaikan oleh setiap anak, EYS yang dihitung untuk populasi berusia 7 tahun ke atas digunakan untuk menggambarkan kondisi perkembangan sistem pendidikan di berbagai tingkatan.
- c. Jumlah tahun pendidikan formal yang diperkirakan akan diselesaikan oleh seorang anak pada usia tertentu di masa depan dikenal sebagai Tahun Pendidikan yang Diharapkan (EYS). Perhitungan ini didasarkan pada asumsi bahwa kemungkinan seorang anak untuk melanjutkan pendidikannya di usia yang lebih tua setara dengan persentase penduduk dalam kelompok usia tersebut yang terdaftar di

¹⁸⁹Anto, "Introducing an Islamic Human Development Index (I-HDI) to Measure Development in OIC Countries," 2010.80-88

sekolah pada saat pengukuran dilakukan. Dengan menghitung lamanya masa sekolah yang dapat diselesaikan oleh setiap anak, EYS yang dihitung untuk populasi berusia 7 tahun ke atas digunakan untuk menggambarkan kondisi perkembangan sistem pendidikan di berbagai tingkatan.¹⁹⁰

5. I-HDI (Y)

Indeks Pembangunan Manusia Islam, atau I-HDI, adalah suatu ukuran yang digunakan untuk menilai pembangunan manusia dari sudut pandang Islam.¹⁹¹ Konsep Maqashid Syariah, atau tujuan-tujuan Syariah, digunakan sebagai indikator kebutuhan manusia, baik material maupun spiritual, dalam penyusunan I-HDI. I-HDI mengukur tingkat kesejahteraan seseorang dengan melihat seberapa baik kebutuhan dasarnya terpenuhi, sehingga memungkinkan mereka menjalani kehidupan yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat (dengan demikian mencapai falah). Al-Shatibi menyatakan bahwa agama (*ad-dien*), jiwa (*an-nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan (*an-nasl*), dan harta (*al-mal*) merupakan lima komponen kepentingan mendasar (*maslahah*) yang diperlukan bagi kehidupan manusia.¹⁹² Kelima unsur ini merupakan kebutuhan dasar manusia, yang harus dipenuhi agar seseorang dapat menjalani kehidupan yang bahagia baik di dunia ini maupun di akhirat. Tidak mungkin mencapai kebahagiaan sejati dalam hidup jika salah satu dari kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi atau terpenuhi secara tidak seimbang.¹⁹³

¹⁹⁰ Zain dan Melliana, Analisis Statistika.78

¹⁹¹ Anto, "Introduction An Islamic Human Development Index (I-HDI) To Measure Development In OIC Countries.", 60

¹⁹² Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā Al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah* (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1999), 340.

¹⁹³ M N A Ali Khan dan S R M Shafiai, "Integrating Islamic Human Development Index with Islamic Wealth Index: A Sustainable Development Approach," *Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 14, no. 2 (2021): 264–82.

6. Pertumbuhan Ekonomi (Z)

Salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan suatu perekonomian adalah pertumbuhan ekonomi. Besarnya pertumbuhan tersebut, sebagaimana tercermin dari perubahan dalam produksi nasional, menentukan sejauh mana perekonomian tersebut telah berkembang.¹⁹⁴ Analisis ekonomi jangka pendek berfokus pada perubahan dalam produksi ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan volume dan nilai produk serta jasa yang dihasilkan di suatu negara selama periode waktu tertentu berdasarkan kepada beberapa indikator dari pendapatan nasional, pendapatan perkapita, jumlah tenaga kerja yang lebih besar dari jumlah pengangguran, serta berkurangnya tingkat kemiskinan. Sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya modal semuanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi.¹⁹⁵

Tiga faktor penting memengaruhi pertumbuhan ekonomi, menurut sejumlah teori, termasuk teori pertumbuhan endogen Romer, model neoklasik Solow, dan model Harrod-Domar. Faktor-faktor tersebut meliputi:¹⁹⁶ a) akumulasi modal, yang mencakup investasi baru dalam tanah, mesin, dan modal manusia; b) pertumbuhan penduduk, yang pada akhirnya memperluas jumlah angkatan kerja; dan c) kemajuan teknologi.¹⁹⁷

Abdurrahman Yusro berpendapat bahwa QS. Nuh:70:16 menggambarkan kemajuan ekonomi:

Artinya: “Mintalah ampunan kepada Tuhanmu, sebab Dia Maha Pengampun,” kataku kepada mereka. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang melimpah bagi kalian. Dan Dia akan menambah kekayaan serta keturunan kalian, serta memberikan

¹⁹⁴ Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, *Economic Development*, Edisi ke-13 (Harlow, England: Pearson, 2020).7-8

¹⁹⁵ Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, *Economic Development*, Edisi ke-13 (Harlow, England: Pearson, 2020).7-9

¹⁹⁶ Solow, Robert M. (1956). "A contribution to the theory of economic growth," *Quarterly Journal of Economics* 70: 65–94

¹⁹⁷ Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, *Economic Development*, Edisi ke-13 (Harlow, England: Pearson, 2020).158-160

*kalian kebun-kebun dan sungai-sungai.”*¹⁹⁸ Firman Allah (SWT) menegaskan hal ini dalam Surah Al-A'rāf, ayat 96: “*Artinya: “Kami pasti telah menganugerahkan karunia-karunia dari langit dan bumi kepada penduduk negeri-negeri itu seandainya mereka taat dan beriman, tetapi mereka mengabaikan (perintah-perintah Kami), sehingga Kami menghukum mereka atas perbuatan mereka”*”.

Jelaslah dari penjelasan di atas bahwa mengamalkan **istighfar** (meminta ampunan kepada Allah), menjauhi dosa, dan menjalani kehidupan berdasarkan prinsip-prinsip ketakwaan dan iman dapat membawa kesejahteraan dan kebahagiaan dalam hidup. Sebuah masyarakat yang secara terus-menerus menjaga ketakwaannya akan mendapatkan rezeki yang cukup dari Allah. Di sisi lain, menemukan kedamaian dan stabilitas dalam hidup menjadi sulit ketika kemaksiatan meningkat dan ketaatan kepada Allah menurun.

Menurut teori-teori tradisional tentang pertumbuhan ekonomi, sejumlah faktor juga memengaruhi pertumbuhan ekonomi dari perspektif Islam.¹⁹⁹ unsur-unsur tersebut meliputi: a) stabilitas politik, sosial, dan ekonomi; b) tingkat aktivitas investasi yang tinggi; c) produktivitas; dan d) pentingnya pasar.²⁰⁰

¹⁹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponogoro, 2010), 570.

¹⁹⁹ Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam Ditengah Krisis Ekonomi Global* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 142.

²⁰⁰ Solow, Robert M. (1956). "A contribution to the theory of economic growth," *Quarterly Journal of Economics* 70: 65–94